

**ANALISIS PRAKTIK *ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE* PADA  
PT BANK SYARIAH INDONESIA LAMONGAN**

**SKRIPSI**



OLEH

**SYAHRUL MUBAROK**

**NIM: 402180219**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

**TAHUN AKADEMIK**

**NOVEMBER 2024**

**ANALISIS PRAKTIK *ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE* PADA  
PT BANK SYARIAH INDONESIA LAMONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Mendapatkan Gelar Sarjana



OLEH

**SYAHRUL MUBAROK**

**NIM: 402180219**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

**TAHUN AKADEMIK**

**NOVEMBER 2024**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
 Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Naskah Skripsi berikut ini :

Judul : Analisis Praktik *Islamic Corporate Governance* pada PT Bank Syariah Indonesia Lamongan

Nama : Syahrul Mubarak

NIM : 402180219

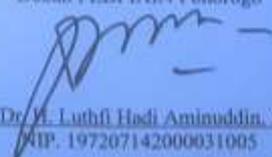
Jurusan : Perbankan Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Perbankan.

Dewan Penguji :

Ketua sidang	:	
Ridho Rokamah, S.Ag., M.SI.	:	
NIP. 197412111999032002	:	(.....)
Penguji I	:	
Muhtadin Amri, M.S.Ak.	:	
NIP. 198907102018011001	:	(.....)
Penguji II	:	
Faruq Ahmad Futaqi, M.E.	:	
NIP. 198311262019031006	:	(.....)

Ponorogo, 25 November 2024  
 Mengesahkan,  
 Dekan FEBI IAIN Ponorogo

  
 Prof. Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.  
 NIP. 197207142000031005

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

*Good Corporate Governance* secara istilah merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua stakeholder.<sup>1</sup> Menurut Wijaya *Good Corporate Governance* adalah sistem atau metode pengelolaan perusahaan untuk menciptakan nilai yang lebih baik lagi bagi stakeholdernya yang sesuai dengan prinsip GCG yaitu akuntabilitas, transparan, indenpedensi, responsibility dan fairness.<sup>2</sup> Secara garis besar *Good Corporate Governance* adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggung jawabannya kepada para *stakeholders* pada umumnya.<sup>3</sup>

Sukrisno memberikan istilah *corporate governance* dalam perspektif Islam dengan ICG.<sup>4</sup> ICG digambarkan untuk *corporate governance* dalam perspektif islam pada bank syariah.<sup>5</sup> ICG mencoba untuk mengarahkan agen-agen ekonomi, sistem hukum, dan *corporate governance* kepada nilai-nilai moral dan sosial berdasarkan hukum syariah.

---

<sup>1</sup> Adrian. Sutedi, *Good Corporate Governance* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 34.

<sup>2</sup> A. Wijaya. Tunggal, *Internal Audit Dan Good Corporate Governance* (Jakarta: Erlangga, 2013), 123.

<sup>3</sup> Vivi Oktavia, Jefri Ulfi, and Jaka wijaya Kusuma, "Pengaruh Good Corporate Governance Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di BEI Periode 2015 - 2018)," *Jurnal Revenue* 01, no. 02 (2020): 143–51, <https://doi.org/https://doi.org/10.46306/rev.v1i2.16>.

<sup>4</sup> Sukrisno. Agoes, *Etika Bisnis Dan Profesi* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 256.

<sup>5</sup> Hikmah Endraswati, "Konsep Awal Islamic Corporate Governance: Peluang Penelitian Yang Akan Datang," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2015): 89, <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i2.89-108>.

Berbagai kegiatan ekonomi, perusahaan, dan bisnis didasarkan pada paradigma *ethoreligious* dengan tujuan tunggal yaitu kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Pada dasarnya, ICG memiliki kesamaan tujuan dengan *corporate governance* pada umumnya, namun ICG mengacu pada nilai agama Islam. ICG mencoba untuk memadukan antara hukum Islam dengan model *stakeholder* dalam *corporate governance*. Andrian Sutedi menjelaskan terdapat dua sifat dari ICG.<sup>6</sup> Pertama, seluruh aspek kehidupan, etika, dan sosial perusahaan harus mengacu pada hukum Islam. Kedua, ICG juga harus mengacu pada etika bisnis dan prinsip-prinsip ekonomi dan keuangan Islam diantaranya terkait dengan perintah zakat, pelarangan riba, larangan spekulasi, dan perintah untuk mengembangkan sistem ekonomi berdasarkan *profit and loss sharing*.<sup>7</sup>

Awal mula munculnya *Islamic Corporate Governance (GCG)* dikarenakan sering dibincangkan oleh beberapa perusahaan seiring dengan timbulnya kesadaran masyarakat, pemerintah, pemegang saham dan manajemen perusahaan terkait akan pentingnya sebuah sistem yang baik dan benar guna meningkatkan kinerja perusahaan. Dampak apabila system ini buruk maka akan terjadi krisis moneter seperti yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 sehingga para petinggi perusahaan bahkan sampai pemerintah harus terlibat dalam krisis moneter tersebut. Maka dengan munculnya fenomena tersebut berbagai upaya dilakukan untuk

---

<sup>6</sup> Sutedi, *Good Corporate Governance*, 102.

<sup>7</sup> Hibat Khoirul, "Analisis Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Pada Lembaga Keuangan Syariah Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Pengembalian Pembiayaan (Studi Kasus BMT As Salam Kras Kediri)" (UIN Satu Tulung Agung, 2018), <http://repo.uinsatu.ac.id/id/eprint/9618>.

meningkatkan kinerja perusahaan baik perusahaan milik pemerintah dan perusahaan milik swasta dengan cara menerapkan *Islamic corporate Governance*.

Berdasarkan hasil peninjauan awal pada PT Bank Syariah Indonesia di Lamongan peneliti menemukan suatu masalah yang kompleks yang mana terdapat suatu golongan masyarakat yang beranggapan bahwasannya bank yang memiliki label syariah tidak bersungguh-sungguh dalam mengimplementasikan ICG sebagaimana mestinya, terlebih lagi bank berbasis syariah yang notabennya dalam pandangan masyarakat tidak secara Cuma-Cuma hanya mementingkan profit semata akan tetapi diharapkan dapat membantu masyarakat secara rata dalam segala hal perberdayaan program-program social. Akan tetapi masyarakat awam memilih beraanggapan bahwasanya bank syariah hanya mementingkan profit semata dan tidak sepenuhnya mengimplementasikan ICG. Bank Syariah Indonesia Lamongan dalam hal menjalankan proses roda bisnis tak berhenti untuk mengakomodasi nilai-nilai yang sesuai dengan prinsip keislaman serta berusaha penuh dalam menerapkan prinsip kebaikan lainnya yang diharapkan mampu menjamin hak dan kewajiban konsumen.

Argumentasi pemilihan PT Bank Syariah Lamongan dikarenakan bank tersebut sudah menerapkan konsep *Islamic Corporate Governance* secara keseluruhan dan banyak diminati oleh para konsumen. Argumentasi selanjutnya adalah karena PT Bank Syariah Indonesia Lamongan memiliki pelayanan dan keamanan yang baik serta telah menerapkan prinsip akuntabilitas. Dimana akuntabilitas merupakan sikap tanggung jawab serta

menjalankan pekerjaan dengan profesional, penuh inovasi, keteladanan, konsisten yang tinggi dan kerjasama yang baik. Berdasarkan hasil peninjauan tersebut maka judul skripsi ini adalah Analisis Praktik *Islamic Corporate Governance* pada PT Bank Syariah Indonesia Lamongan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sekaligus menganalisis konsep *Islamic Corporate Governance* apa saja yang sudah diterapkan di PT Bank Syariah Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan problematika di atas maka fokus penelitian ini berada di PT Bank Syariah Indonesia Lamongan. Sehingga rumusan masalah yang diangkat adalah

1. Bagaimana Penerapan *Islamic Corporate Governance* di PT Bank Syariah Indonesia Lamongan?
2. Bagaimana Kendala dan Solusi Penerapan *Islamic corporate Governance* di PT Bank Syariah Indonesia Lamongan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian dan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis dan mendeskripsikan penerapan *Islamic Corporate Governance* di PT Bank Syariah Indonesia Lamongan.
2. Menganalisis dan mendeskripsikan Kendala dan Solusi Penerapan *Islamic corporate Governance* di PT Bank Syariah Indonesia Lamongan

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat hasil kajian ini ditinjau dari dua sisi, yaitu secara teoritis dan praktis.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini akan menemukan pola penerapan *Islamic Corporate Governance* pada PT Bank Syariah Indonesia Lamongan.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini secara praktis bermanfaat bagi PT bank Syariah Indonesia Lamongan dalam membuat kebijakan tentang konsep *Islamic Corporate Governance* dan mengimplementasikan *Islamic Corporate Governance* di PT Bank Syariah Indonesia Lamongan

#### **E. Studi Penelitian Terdahulu**

Kajian mengenai konsep *Islamic Corporate Governance* merupakan kajian yang sudah banyak diujakan oleh beberapa peneliti. Berikut ini beberapa kajian yang membahas mengenai *Islamic Corporate Governance*.

Pertama Riset Dinda Dwi Saputri dalam kajiannya yang berjudul "Analisis Pengaruh Penerapan *Islamic Corporate Governance* Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jambi".<sup>8</sup> Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis data meliputi kondesasi data, display data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip *Good Corporate Governance* di

---

<sup>8</sup> Dinda Dwi Safitri, "Analisis Pengaruh Penerapan *Islamic Corporate Governance* Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jambi" (UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020).

BSM Kantor Cabang Jambi berjalan dengan baik sebagaimana undang-undang yang berlaku, sedangkan penerapan prinsip *Islamic Corporate Governance* di BSM Kantor Cabang Jambi masih belum berjalan dengan baik sebagaimana. Kegiatan bisnis dan operasional yang dijalankan berdasarkan pada moral dan nilai-nilai syariah.

Riset kedua yaitu karya Muwahid Ummah yang berjudul *Analisis Praktik Islamic Corporate Governance Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Pt Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Makassar)*<sup>9</sup>. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang terdiri dari wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan *Islamic corporate governance* pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk memiliki nilai-nilai Islam dengan menerapkan dimensi tauhid, keadilan, syura, hisbah, dan audit relijius. Dari sisi keadilan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk berusahamewujudkan nilai keadilan pada aspek spiritual dan material terhadap stakeholdernya.

Riset ketiga yaitu karya Dewi Masruroh yang berjudul *Penerapan Prinsip Islamic Corporate Governance dalam Perbankan Syahriah (Analisis Bank Mandiri Syariah, Bank Negara Indonesia Syariah, dan Bank Rakyat Indonesia Syariah)*.<sup>10</sup> penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menerangkan bahwa penerapan prinsip-prinsip GC selain untuk

---

<sup>9</sup> Muwahid Ummah, “Analisis Praktik *Islamic Corporate Governance* Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Pt Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Makassar)” (Universitas hasanuddin Makasar, 2013).

<sup>10</sup> Dewi Masruroh, “Penerapan Prinsip *Islamic Corporate Governance* Dalam Perbankan Syahriah (Analisis Bank Mandiri Syariah, Bank Negara Indonesia Syariah, Dan Bank Rakyat Indonesia Syariah)” (Universitas Jember, 2016).

meningkatkan daya saing bank itu sendiri, juga untuk lebih memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa : ”Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut, bank wajib berpedoman pada berbagai ketentuan dan persyaratan minimum serta pedoman yang terkait dengan pelaksanaan tata kelola yang baik (Good Corporate Governance).

Riset ke-empat karya Rema Junega Nabila dengan judul *Analisis Islamic Corporate Governance dan Islamic Corporate Social Responsibility Terhadap Reputasi dengan Kinerja Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Bank Syariah Tahun 2010-2019)*.<sup>11</sup> Penelitian ini menganalisis pengaruh Islamic Corporate Governance (ICG), Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) dan Financial Performance (ROE) terhadap Reputasi Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2010-2019. Sampel dipilih dengan metode purposive sampling. Jumlah sampel yang diambil adalah 9 sampel bank dalam kurun waktu 10 tahun. Variabel independen dalam penelitian ini adalah ICG dan ICSR dengan ROE sebagai variabel moderasi. Sedangkan variabel terikatnya adalah reputasi BUS. Metode analisis yang digunakan adalah Regresi Data Panel dengan alat analisis e-views 9. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ICG

---

<sup>11</sup> Rema Junega Nabila, “Analisis Islamic Corporate Governance Dan Islamic Corporate Social Responsibility Terhadap Reputasi Dengan Kinerja Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Bank Syariah Tahun 2010-2019)” (Universitas Islam Negeri Syarifhidayatullah Jakarta, 2016).

berpengaruh signifikan terhadap reputasi BUS. ICSR dan ROE tidak berpengaruh signifikan terhadap reputasi BUS. Oleh karena itu ROE secara signifikan mampu memoderasi hubungan ICG dengan Reputasi BUS. Sementara itu ROE tidak mampu memoderasi hubungan ICSR dengan Reputasi BUS.

Riset ke-lima karya Ayesha Riska Sonia dengan Judul Analisis Implementasi *Islamic Corporate Governance* Pada Pt. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Banda Aceh<sup>12</sup>. Penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan Islamic Corporate Governance yang dilakukan pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif menggunakan data primer (melalui wawancara dan penyebaran kuesioner) dan data sekunder (menggunakan data laporan tata kelola Bank Aceh). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Aceh menerapkan Islamic Corporate Governance melalui pendekatan Good Corporate Governance dan adanya penambahan indikator Syariah Compliance pada penerapan tersebut.

Riset ke-enam karya Mike Sonita dan Nayag Helmayunita dengan judul penelitian Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting ( Studi Empiris Pada Perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index Tahun 2013-2017).<sup>13</sup> Penelitian ini

---

<sup>12</sup> Ayesha Riska Sonia, "Analisis Implementasi Islamic Corporate Governance Pada Pt. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Banda Aceh" (Universitas Islam Negeri ar-Raniry Banda Aceh, 2020).

<sup>13</sup> Mike Sonita Sari and Nayag Helmayunita, "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index Tahun 2013-2017)," *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 1, no. 2 (2019): 751–68, <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/jea.v1i2.108>.

membahas Good Corporate Governance (GCG) terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR). Total sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 65 laporan tahunan dari 13 perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) periode 2013-2017. Pengukuran pengungkapan ISR dilakukan dengan cara analisis konten melalui metode scoring pada laporan tahunan masing-masing emiten syariah. Analisis data dilakukan dengan statistik deskriptif dan uji asumsi klasik serta uji hipotesis dengan regresi linier berganda, uji F, uji R<sup>2</sup>, dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ISR. Ukuran komisaris independen, ukuran komite audit, dan kepemilikan publik berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan ISR. Kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.

Riset ke-tujuh karya Siti Maria Wardayati yang berjudul *Implikasi Syariah Governance Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Bank Syariah*.<sup>14</sup> Objek penelitian ini adalah Bank Muamalat Indonesia Jawa Tengah, sedangkan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 200 responden dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis SEM dengan bantuan AMOS. Hasil data komputasi menunjukkan bahwa penerapan pemerintahan syariah yang terdiri dari 6 (enam) indikator yaitu: transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, keadilan dan kepatuhan syariah telah menunjukkan

---

<sup>14</sup> Siti Maria Wardayati, "Implikasi Syariah Governance Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Bank Syariah," *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 19, no. 1 (2011): 1, <https://doi.org/10.21580/ws.2011.19.1.210>.

hasil yang baik. Kepatuhan terhadap syariah merupakan indikator pemerintahan Islam yang dominan, sedangkan tanggung jawab dan keadilan merupakan indikator lemahnya tata kelola dalam menjelaskan syariah. Penerapan syariah governance berpengaruh signifikan terhadap reputasi dan kepercayaan nasabah pada bank syariah.

Riset ke-delapan karya Hana Fadhilah yang berjudul Pengaruh Islamic Corporate Governance (ICG) Terhadap Financial Shenanigans (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Tahun 2015-2017).<sup>15</sup> Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi pengujian hipotesis. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah tahun 2015-2017. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan yang dipublikasikan. Analisis statistik yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil analisis uji-F menunjukkan bahwa *Islamic Corporate Governance* yang diproksi dengan komisaris independen, komite audit, dewan pengawas syariah, rapat komisaris, rapat komite audit, dan rapat dewan pengawas syariah secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap Financial Shenanigans yang diukur dengan discretionary accruals. Hasil analisis uji-t menunjukkan bahwa *Islamic Corporate Governance* yang diproksi dengan rapat komite audit dan rapat dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap Financial Shenanigans sedangkan komisaris

---

<sup>15</sup> Hana Fadhilah, "Pengaruh Islamic Corporate Governance (ICG) Terhadap Financial Shenanigans," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan* Vol.13, no. 1 (2019): 14–22.

independen, komite audit, dewan pengawas syariah, dan rapat komisaris tidak berpengaruh terhadap Financial Shenanigans.

Riset ke-sembilan karya Siti Juariah Dinnul Alfian Akbar dan Titin Hartini yang berjudul *Peran Kinerja Keuangan Dalam Memediasi Islamic Corporate Governance Terhadap Fraud*.<sup>16</sup> Penelitian ini membahas tentang kinerja keuangan dalam memediasi ICG terhadap Fraud. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari Laporan Tahunan dan Laporan *Good Corporate Governance* 2015-2019 Perbankan Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia. Penelitian ini menggunakan software Structural Equation Modeling (SEM), khususnya Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian ini adalah: *Islamic Corporate Governance* berpengaruh negatif terhadap Fraud; *Islamic Corporate Governance* berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja Keuangan; Kinerja Keuangan berpengaruh signifikan negatif terhadap Fraud; dan Kinerja Keuangan Memediasi pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap Fraud.

Riset ke-sepuluh karya Nono Hartono dengan judul *Analisis Pengaruh Islamic Corporate Governance (ICG) Dan Intellectual Capital (IC) Terhadap Maqashid Syariah Indeks (MSI) Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*.<sup>17</sup> Penelitian ini menganalisis dan mendeskripsikan bahwa perbankan syariah wajib bekerja sesuai dengan prinsip dan etika bisnis

---

<sup>16</sup> Juariah Siti, Dinnul Alfian Akbar, and Hartini Titin, "Peran Kinerja Keuangan Dalam Memediasi Islamic Corporate Governance Terhadap Fraud," *Review of Islamic Economics* 96, no. 1 (2021): 5–29.

<sup>17</sup> Nono Hartono, "Analisis Pengaruh Islamic Corporate Governance (ICG) Dan Intellectual Capital (IC) Terhadap Maqashid Syariah Indeks (MSI) Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah* 10, no. 2 (2018): 259, <https://doi.org/10.24235/amwal.v10i2.3249>.

syariah, salah satunya melalui penerapan tata kelola (*Islamic Corporate Governance/ICG*) dan pemanfaatan modal modal (*Intellectual Capital/IC*) guna mencapai tujuan perbankan. mendirikan bank syariah sesuai dengan maqashid syariah (diukur melalui Maqashid Syariah Index/MSI). Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ICG dan iB-VAIC mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap MSI. Artinya pengungkapan item ICG dan pengelolaan IC akan berdampak pada peningkatan nilai MSI bank syariah.

Riset ke-sebelas karya Riri Mayliza dan Arie Yusnelly yang berjudul Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Islamic Social Responsibility Pada Bank Umum Syariah di Indonesia.<sup>18</sup> Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan memanfaatkan aplikasi Smart PLS dan menerapkan teknik Structure Equation Model (SEM). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan kuantitatif dengan data sekunder, di mana populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 13 Bank Umum Syariah (BUS) yang ada di Indonesia. Penelitian ini menghasilkan penemuan yang menarik di antaranya adalah bahwa terdapat pengaruh positif signifikan proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR). Juga terdapat pengaruh positif signifikan ukuran Dewan Komisaris terhadap *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR). Namun, tidak terdapat pengaruh ukuran Komite Audit terhadap *Islamic Corporate Sosial Responsibility* (ICSR), serta tidak

---

<sup>18</sup> Riri Mayliza and Arie Yusnelly, "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Islamic Social Responsibility Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 4, no. 2 (2021): 369–79, [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(2\).7616](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).7616).

berpengaruh jumlah rapat Komite audit terhadap *Islamic Corporate Sosial Responsibility (ICSR)*.

Riset ke-duabelas karya Maya Indriastuti dan Naila Najihah yang berjudul *Improving Financial Performance Through Islamic Corporate Social Responsibility And Islamic Corporate Governance*.<sup>19</sup> Populasi penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia tahun 2013-2018 yang berjumlah sebanyak 72 Bank Umum Syariah. Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan teknik purposive sampling sebanyak 60 Bank Umum Syariah. Semua data dalam variabel ini akan di analisis menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan SPSS versi 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Islamic corporate social responsibility* dan *Islamic corporate governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan Bank Umum Syariah. Secara teoritis, hasil penelitian ini mendukung teori agensi dan teori sharia enterprise sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk penelitian yang akan datang. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memicu Bank Umum Syariah untuk selalu mengembangkan praktik *Islamic corporate social responsibility* dan *Islamic corporate governance*, sehingga mampu meningkatkan minat masyarakat untuk selalu bertransaksi di Bank Umum Syariah.

---

<sup>19</sup> Maya Indriastuti and Naila Najihah, "Improving Financial Performance Through Islamic Corporate Social Responsibility and Islamic Corporate Governance," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga* 5, no. 1 (2020): 818, <https://doi.org/10.31093/jraba.v5i1.206>.

Riset ke-tiga belas karya Haifa Najib dan Rini yang berjudul *Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance Dan Fraud Pada Bank Syariah*.<sup>20</sup> dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah Fraud pada bank syariah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Bank Indonesia periode tahun 2010 hingga 2014. Sampel dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 8 Bank Umum Syariah dengan periode penelitian 5 tahun. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda yang diolah menggunakan SPSS versi 22. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan syariah dengan Proxy Profit Sharing Ratio berpengaruh negatif signifikan terhadap Fraud bank syariah sedangkan *Islamic Income Ratio*, *Islamic Investment Ratio* dan *Islamic Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap Fraud di bank syariah.

Riset ke-empat belas karya Isnawati Hariwibowo yang berjudul *Analisis Pengaruh Islamic Corporate Governance Terhadap Corporate Sosial Responsibility*.<sup>21</sup> Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan penelitian ilmiah berupa ilmu ekonomi positif. Sifat dan jenis penelitian ini adalah metode deskriptif yang digunakan berdasarkan survei literatur. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda dengan tingkat signifikansi 5%, maka hasil penelitian ini menyimpulkan:

---

<sup>20</sup> Haifa Najib and Rini Rini, "Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance Dan Fraud Pada Bank Syariah," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 4, no. 2 (2019): 131–46, <https://doi.org/10.35836/jakis.v4i2.23>.

<sup>21</sup> Isnawati Hariwibowo, "Analisis Pengaruh Islamic Corporate Governance Terhadap Corporate Sosial Responsibility," *Esensi Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 2015, <https://core.ac.uk/download/pdf/297665602.pdf>.

(1) *Islamic Corporate Governance* yang terdiri dari Keberadaan dan Keahlian Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. (2) Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. (3) Komposisi Dewan Komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. (4) Frekuensi jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Riset ke-lima belas karya Rkya Lidya yang berjudul *Islamic Corporate Governance, Islamicity financial Performance Index And Fraudat Islamic Bank*.<sup>22</sup> Penelitian ini menguji secara empiris faktor-faktor terjadinya kecurangan pada bank syariah berdasarkan teori segitiga penipuan, yaitu motivasi, peluang dan rasionalisasi harus dipenuhi agar terjadinya penipuan. Penelitian ini mengembangkan indikator sebagai proksi motivasi, peluang dan rasionalisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Islamic Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap *Islamicity Performance Index*, *Islamic Income Ratio*, *Profit Sharing Ratio* dan *Islamic Investment Ratio (Islamicity Financial Performance Index)* berpengaruh terhadap *Fraud*, *Islamic Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap *Fraud*, dan *Islamic Income Rasio*, *Rasio Bagi Hasil* dan *Rasio Investasi Islam (Islamicity Financial Performance Index)* tidak memediasi pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap *Fraud* pada

---

<sup>22</sup> Rika Lidyah, "Islamic Corporate Governance, Islamicityfinancial Performance Index And Fraudat Islamic Bank," *Jurnal Akuntansi* 22, no. 3 (2018): 437, <https://doi.org/10.24912/ja.v22i3.398>.

Bank Umum Syariah atau dapat dikatakan tidak ada mediasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor berdasarkan segitiga penipuan efektif digunakan dalam menjelaskan penipuan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Metode kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci.<sup>23</sup> Teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada generalisasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Sugiyono yaitu penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka.

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang di alami.<sup>24</sup> Menurut Bogman dan Tylor metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan

---

<sup>23</sup> Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018), 99.

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2015), 91.

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati.

## **2. Data dan Sumber Data**

### **a. Data**

Data yang diperoleh adalah kata-kata deskriptif berupa tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>25</sup> Data yang diperoleh adalah hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi tentang Islamic Corporate Governance di PT Bank Syariah Indonesia Lamongan.

### **b. Sumber Data**

Sedangkan sumber data adalah subjek asal tempat diperoleh, dapat berupa bahan pustaka, atau orang. Adapun untuk unit analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan dan ditentukan oleh peneliti dari subjek penelitian. Adapun objek penelitian adalah masalah pokok yang dijadikan fokus penelitian atau yang menjadi titik perhatian suatu penelitian.

- 1) Data primer diantaranya : Wawancara dengan sejumlah informan yang meliputi : Direkturr PT Bank Syariah Indonesia Lamongan, Wakil Direktur PT Bank Syariah Indonesia Lamongan dan Pegawai PT Bank Syariah Indonesia Lamongan.
- 2) Data sekunder meliputi beberapa karya ilmiah dan jurnal yang selaras dengan tema *Islamic Corporate Governance*.

---

<sup>25</sup> Johnny Saldana Mattheew B. Miles, A Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook* (London: SAGE, 2014), 55.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.<sup>26</sup> Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berupaya serta (*participan observasi*), wawancara mendalam dan dokumentasi.<sup>27</sup> Dalam proses pengumpulan data, instrumen yang digunakan oleh peneliti diantaranya observasi, wawancara, dokumentasi.

#### a. Observasi

Observasi (*observasi*) atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi dapat dilakukan secara partisipatif ataupun non partisipatif. Dalam observasi partisipatif pengamat ikut serta dalam kegiatan yang sedang berlangsung, pengamat ikut sebagai peserta rapat atau peserta penelitian. Dalam observasi nonpartisipatif pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan, dia hanya berupayamengamati kegiatan, tidak ikut dalam kegiatan.<sup>28</sup> Data yang diambil melalui observasi

---

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: CV Alfabeta, 2016), 78.

<sup>27</sup> Sugiyono, 123.

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*, 220.

meliputi penerapan konsep *Islamic Corporate Governance* di PT Bank Syariah Indonesia Lamongan.

b. Wawancara

Wawancara atau interviu (*interview*) merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Wawancara dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual. Adakalanya juga wawancara dilakukan secara kelompok, kalau memang tujuanya untuk menghimpun data dari kelompok seperti wawancara dengan suatu keluarga, pengurus yayasan, pembina pramuka, dll. Wawancara yang diajukan untuk memperoleh data dari individu dilaksanakan secara individual.

Data yang digali melalui wawancara yaitu bagaimana penerapan *Islamic Corporate governance* di Bank Syariah Lamongan, bagaimana kendala yang dihadapi dalam menerapkan prinsip *Islamic Corporate Governance* dan produk serta layanan apa saja yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia Lamongan.

c. Dokumentasi

Teknik ini adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip, buku, foto, transkrip, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.<sup>29</sup> Data yang digali pada dokumentasi berupa sejarah singkat berdirinya PT Bank

---

<sup>29</sup> Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 23.

Syariah Indonesia, Struktur Lembaga, Visi dan Misi lembaga, Jumlah Pegawai dan Peraturan PT Bank Syariah Indonesia Lamongan.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Miles, Huberman dan Sarndana dalam buku *Qualitative Data Analysis* mengemukakan bahwa kita menganalisis ada 3 tahapan (1) reduksi data (*data reduction*) (2) menyajikan data (*data display*) (3) kesimpulan (*conclusions*).<sup>30</sup>

##### a. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, menyederhanakan, dan mengubah data di dalam isi dari penulisan data penelitian, dengan mengkonsolidasi data kita menjadi lebih kuat. Reduksi data tidak memerlukan quantifikasi. Data kualitatif dapat dirubah dengan banyak cara melalui seleksi, meringkas atau memparaprasakan.

---

<sup>30</sup> A. Michael Huberman and Saldana Jhonny, *Qualitative Data Analysis a Methods Sourcebook* (America: Arizona State University, 2014), 24.

b. Display Data

Penyajian data (*data display*) merupakan kumpulan data yang diringkas dari data kondensasi, kemudian data tersebut disimpulkan. Penyajian data dapat berupa matrik, drafik, chart dan networks. Data yang didisplay adalah tentang struktur organisasi, sarana prasarana, hasil wawancara.

c. Conclusion

Dalam tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.<sup>31</sup> Tetapi apabila kesimpulan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Penelitian ini menyimpulkan mengenai konsep *Islamic Corporate Governance* pada Pt Bank Syariah Indonesia Lamongan.

---

<sup>31</sup> Mattheew B. Miles, A Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*, 129.

## 5. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Teknik keabsahan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding dari data tersebut. Sedangkan teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan hasil data yang berkaitan dengan konsep *Islamic Corporate Governance* yang terdapat dalam setiap kegiatan perbankan dengan para informan. Informan tersebut yaitu direktur PT Bank BSI Lamongan, dan para pegawai bank. Sedangkan teknik triangulasi yaitu teknik yang dilakukan dengan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Pada penelitian ini, triangulasi teknik digunakan untuk mendapatkan data tentang penerapan konsep *Islamic Corporate Governance* di Pt Bank BSI Lamongan.

## 6. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini di bagi kedalam beberapa bab, diantara bab satu dengan bab yang lainnya mempunyai hubungan yang signifikan, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh dan padu. Demi mempermudah pemahaman dan memperjelas arah pembahasan, penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab dengan uraian sebagai berikut.

**BAB I** : Pendahuluan. Bab ini merupakan ragam dari keseluruhan isi penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah kajian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II :** Berisi tentang kajian teori yang meliputi materi *Islamic Corporate Governance*, prinsip-prinsip *islamic corporate governance*, nilai-nilai *Islamic Corporate Governance*, tujuan *Islamic Corporate Governance*, tahap-tahap penerapan *Islamic corporate Governance* dan teori bank syariah.

**BAB III :** Berisi tentang data dan analisis rumusan masalah 1 yang meliputi: gambaran umum lokasi penelitian, sejarah bank syariah Indonesia, visi misi bank BSI Lamongan, data karyawan, dan implementasi *Islamic Corporate Governance* di Bank BSI Lamongan.

**BAB IV :** Berisi tentang data dan analisis rumusan masalah kedua yaitu kendala dalam penerapan ICG di Bank BSI Lamongan.

**BAB V :** Merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Bab ke-lima merupakan bab terakhir yang memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian tentang

## BAB II

### ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE

#### A. Pengertian *Islamic Corporate Governance*

Menurut Najmudin *Islamic Corporate Governance* (ICG) adalah merupakan suatu sistem atau kebijakan yang mengatur dan mengendalikan jalannya suatu perusahaan yang dimana dengan cara melindungi hak-hak para stakeholders dan mengontrol proses yang terjadi pada suatu perusahaan untuk dapat mencapai tujuan awal perusahaan berdasarkan ketentuan-ketentuan Allah SWT.<sup>1</sup> Gustani mendefinisikan *Islamic Corporate Governance* (ICG) sebagai teori pengembangan pengembangan *stakeholders* yang diterapkan berdasarkan prinsip islam, kegiatan dan operasional yang dijalankan berdasarkan nilai moral dan nilai-nilai Islam.<sup>2</sup> *Islamic Corporate Governance* adalah perkembangan lanjut dari konsep *Good Corporate Governance*. Yang disebut terakhir ini terkait dengan seperangkat aturan atau sistem yang memastikan perusahaan bekerja dengan prinsip-prinsip dan kebijakan yang benar. Langkah menuju terbentuknya *Islamic Corporate Governance* diawali dengan spiritualisasi perusahaan, sebuah sistem tata kelola perusahaan yang dalam perspektif Islam berdasarkan pada paradigma tauhid (monoteisme murni), dan digagas untuk menjadi alternatif *Corporate Governance* dalam perusahaan

---

<sup>1</sup> Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility* (Depok: Kencana, 2017), 52.

<sup>2</sup> Gustani, *Islamic Corporate Governance (I-CG) Dan Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) Teori Dan Praktik* (Bandung: Pena Persada, 2010), 77.

kapitalis yang didasarkan pada pemikiran syirik (pseudi monotheism dan politheism).

*Islamic Corporate Governance* merupakan konsep organisasi dan manajemen profetik yang serba melingkupi semua kegiatan, baik internal maupun eksternal, bisnis perusahaan.<sup>3</sup> Di dalamnya terkandung makna sistem, struktur, proses atau mekanisme, perilaku dan budaya yang mengarahkan dan mengontrol perusahaan sehingga bekerja secara bertanggung jawab terhadap lingkungan dan para stakeholder. Menurut Abdullah *Islamic Corporate Governance* adalah perkembangan lanjut dari konsep *Good Corporate Governance*. Yang disebut terakhir ini terkait dengan seperangkat aturan atau sistem yang memastikan perusahaan bekerja dengan prinsip-prinsip dan kebijakan yang benar. Langkah menuju terbentuknya *Islamic Corporate Governance* diawali dengan spiritualisasi perusahaan, sebuah sistem tata kelola perusahaan yang dalam perspektif Islam berdasarkan pada paradigma tauhid (monoteisme murni), dan digagas untuk menjadi alternatif *Corporate Governance* dalam perusahaan kapitalis yang didasarkan pada pemikiran syirik (pseudi monotheism dan politheism), *Islamic Corporate Governance* merupakan konsep organisasi dan manajemen profetik yang serba melingkupi semua kegiatan, baik internal maupun eksternal, bisnis perusahaan. Di dalamnya terkandung makna sistem, struktur, proses atau mekanisme, perilaku dan budaya yang

---

<sup>3</sup> Sanerya Hendrawan, *Spiritual Management* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2009), 201.

mengarahkan dan mengontrol perusahaan sehingga bekerja secara bertanggung jawab terhadap lingkungan dan para *stakeholder*.

Menurut Endraswati *Islamic Corporate Governance* yang dimaksudkan adalah perusahaan dan manusia yang menjadi penggeraknya memiliki peran yang berbeda dari konsepsi perusahaan dalam perspektif kapitalis.<sup>4</sup> Perusahaan bukan saja alat untuk mengakumulasi kekayaan (*a place of wealth*), tapi juga menjadi tempat untuk menghambakan diri kepada Allah SWT (*a place of worship*) dan tempat berjuang meninggikan kalimat tauhid (*a place of warfare*). Nilai-nilai spiritualitas dalam perusahaan akan menempatkan karyawan pada posisi yang tepat sebagai manusia. Demikian pula karyawan mampu memaknai kerja sebagai ibadah dan perwujudan pertanggungjawaban kepada the ultimate *stakeholder* (Allah SWT). Hal ini akan berdampak pada komitmen organisasi yang tinggi. Gozhali menemukan bukti bahwa konstruk religiusitas dimensi belief, dimensi komitmen, dimensi behaviour berhubungan positif terhadap komitmen organisasi dan keterlibatan kerja.<sup>5</sup> Selanjutnya juga ditemukan bukti bahwa komitmen organisasi dan terlibatan kerja berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Konstruk religiusitas yang digunakan ini lebih mengarah pada kualitas penghayatan dan sikap hidup seseorang berdasarkan nilai-nilai keagamaan yang diyakini, Jadi lebih menekankan pada substansi nilai-nilai luhur keagamaan dan cenderung memalingkan

---

<sup>4</sup> Endraswati, "Konsep Awal Islamic Corporate Governance: Peluang Penelitian Yang Akan Datang."

<sup>5</sup> Safitri, "Analisis Pengaruh Penerapan Islamic Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jambi."

diri dari formalisme keagamaan. Islam mempunyai konsep yang jauh lebih lengkap dan lebih komprehensif serta akhlaqul karimah dan ketaqwaan pada Allah SWT yang menjadi tembok kokoh untuk tidak terperosok pada praktek ilegal dan tidak jujur dalam menerima amanah.<sup>6</sup>

## **B. Prinsip-Prinsip *Islamic Corporate Governance***

### **1. Transparansi (*Shiddiq*)**

Transparansi merupakan pengungkapan (*disclosur*) setiap kebijakan atau aturanyang akan diterapkan perusahaan, sebab kepercayaan investor dan efisiensi pasar sangat tergantung dari pengungkapan kinerja perusahaan secara adil, akurat dan tepat waktu.<sup>7</sup> Pelaku bisnis syariah harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perrundangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan.

### **2. Akuntabilitas (*Amanah*)**

Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perasaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Akuntabilitas didasari pada sistem internal *cheks and balances* yang meencangkup praktek audit yang sehat dan dicapai melalui pengawasan yang efektif yang didasarkan pada keseimbangan kewenangan antara pemegang saham, komisaris, manager, dan auditor. Pelaku bisnis syariah harus dikelola secara

---

<sup>6</sup> Gustani, *Islamic Corporate Governance (I-CG) Dan Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) Teori Dan Praktik*, 88.

<sup>7</sup> Gustani, 90.

benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan pelaku bisnis syariah dengan tetap memperhitungkan pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

Dalam makna lain akuntabilitas (*Accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif bila prinsip Akuntabilitas (*Accountability*) ini diterapkan secara efektif, maka perusahaan akan terlindung dari agency problem (benturan kepentingan peran), dengan menerapkan prinsip pola prima sebagai budaya perusahaan dan sebagai inisiator dan implementator di sebuah perusahaan.<sup>8</sup> Akuntabilitas juga berperan penting dalam mengatur kinerja sebuah perusahaan sehingga hal ini juga dikaitkan dengan prinsip pola prima yang mana pola prima merupakan sebuah wadah partisipasi organisasi untuk tujuan implementasi budaya kerja yang baik dan sehat untuk perusahaan yang diharapkan mampu sejalan dengan tujuan-tujuan organisasi.<sup>9</sup>

### **3. Responsibility (*Tabligh*)**

Responsibility merupakan tanggung jawab perusahaan untuk mematuhi hukum dan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan bisnis syariah, serta termasuk ketentuan yang mengenai lingkungan

---

<sup>8</sup> Prasetyo Henry, *Prinsip Tata Kelola Perusahaan* (Jakarta: Kencana, 2012), 125.

<sup>9</sup> Adya Brata Atep, *Dasar-Dasar Pelayanan Prima* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006), 79.

hidup, perlindungan konsumen, ketenaga kerjaan, larangan monopoli dan praktik persaingan yang sehat, kesehatan dan keselamatan kerja dan peraturan lain yang mengatur kehidupan perusahaan dalam menjalankan aktivitas usahannya. Prinsip responsibility dalam Islam mencakup nilai *amanah, tabligh, dan fatonah*.

#### **4. Professional (*Hurriyah*)**

Profesional merupakan suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat.

#### **5. Fairness (*Tawazzun*)**

Fairness atau keadilan merupakan salah satu manifestasi adil dalam dunia bisnis. Seetiap keputusan bisnis baik dalam skala individu maupun lembaga, hendaklah dilakukan sesuai kewajaran dan kesetaraan sesuai dengan apa yang biasa berlaku dan tidak diputuskan berdasarkan suka atau tidak suka.

### **C. Nilai-Nilai *Islamic Corporate Governance***

Penyampaian wahyu Allah SWT pada umatnya, para Rasul telah dibekali dengan beberapa sifat wajib yaitu *shiddiq, amanah, tabligh, fathanah*.<sup>10</sup> Sifat wajib rasul tersebut menjadi sifat kepemimpinan yang dianjurkan dalam Islam. Karena itu pula, sifat wajib rasul tersebut

---

<sup>10</sup> Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility*, 123.

dijabarkan dalam aplikasi *Islamic Corporate Governance* yang didasarkan pada hukum al-Qur'an dan Hadis.

#### 1. *Shidiq*

*Shiddiq* berarti jujur artinya apa yang disampaikan adalah keadaan yang sebenarnya. Orang dengan karakteristik seperti ini merasa bahwa Allah selalu ada untuk mengawasi perilakunya, sehingga ia menjadi takut untuk melakukan dusta. Kejujuran merupakan salah satu pilar utama dalam *Islamic Corporate Governance*. Beberapa dasar hukum tentang sifat *shiddiq* ini adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّٰدِقِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar” (QS At-Taubah:119).<sup>11</sup>

Selain itu, dalam sebuah hadis Rasulullah Saw bersabda “Hendaklah kalian jujur (benar) karena kejujuran mengantarkan kepada kebaikan. Dan kebaikan akan mengantarkan ke dalam surga. Seseorang yang selalu berusaha untuk jujur akan dicatat oleh Allah sebagai orang jujur. Dan jauhilah oleh kamu sekalian dusta (*kidzib*), karena dusta itu akan mengantarkan kepada kejahatan. Dan kejahatan akan mengantarkan ke dalam neraka. Seseorang yang selalu berdusta akan dicatat oleh Allah sebagai pendusta. *Islamic Corporate*

---

<sup>11</sup> Bisri Mustofa, *Al-Ibris* (kudus, Jawa Tengah: Maktabah Menara Kudus, 2016), 206.

*Governance* menekankan kejujuran dalam ucapan dan tindakan yang merupakansatu kesatuan. Tidak ada lagi korupsi apabila sifat shiddiq ini dimiliki dan diaplikasikan. Perusahaan akan berkembang lebih baik karena bisnis menjadi lebih bersih, fair, tidak ada penipuan serta kedzaliman. Beberapa perusahaan menggunakan shiddiq sebagai salah satu budaya perusahaan seperti Bank Victoria Syariah Annual Report.

## 2. Amanah

Amanah berarti dapat dipercaya, tidak ingkar janji dan bertanggung jawab. Apa yang telah disepakati akan ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Sikap ini memberikan trustworthiness (kepercayaan) dari pihak eksternal dan internal perusahaan. Kepercayaan pihak lain terhadap perusahaan memberikan implikasi seperti investasi, pembiayaan, dan image atau reputasi. Dasar hukum sifat amanah yang digunakan *dalam Islamic Corporate Governance* adalah:<sup>12</sup>

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ  
 إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan

---

<sup>12</sup> Mustofa, 87.

dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (QS An-Nisa 58)

Berdasarkan ayat di atas amanah berarti pula menjaga komitmen. Menciptakan komitmen lebih mudah daripada memeliharanya, karena komitmen membutuhkan niat tulus dan integritas serta loyalitas.

### 3. *Tabligh*

*Tabligh* dapat diartikan menyampaikan kebenaran. Zaman dahulu Rasul menyampaikan wahyu Allah SWT, maka sekarang umat muslim wajib pula menyampaikan kebenaran. Allah swt memerintahkan menegakkannya yang makruf dan mencegah yang munkar serta berlaku bijaksana pada kedua urusan tersebut. Hal ini tercantum dalam QS Ali Imran ayat 110 Allah swt berfirman:<sup>13</sup>

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

”Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang *ma'ruf* dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah.” (QS. Ali Imran:110)

---

<sup>13</sup> Mustofa, 64.

Dengan sikap tablig diharapkan dapat menjadi pemimpin yang bijaksana sehingga mengerti mana yang benar dan mana yang salah sehingga dapat mengajak yang lain ke arah kebenaran.

#### 4. *Fathanah*

*Fathanah* adalah kepastian pengelolaan bank dilakukan dengan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat risiko yang ditetapkan oleh bank. Termasuk didalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan serta rasa penuh tanggung jawab (*mas'uliyah*).

#### **D. Tujuan Penerapan *Islamic Corporate Governance***

Penerapan sistem *Islamic Corporate Governance* diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan melalui beberapa tujuan berikut:<sup>14</sup>

- a. Meningkatkan efisiensi, efektifitas kesinambungan suatu organisasi yang memberikan kontribusi kepada terciptanya kesejahteraan pemegang saham pegawai dan para stakeholder lainnya dan merupakan solusi yang elegan dalam menghadapi tantangan organisasi kedepan.
- b. Meningkatkan legitimasi organisasi yang dikelola dengan terbuka, adil dan dapat dipertanggung jawabkan.

---

<sup>14</sup> Gustani, *Islamic Corporate Governance (I-CG) Dan Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) Teori Dan Praktik*, 210.

- c. Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para stakeholder.
- d. Pendekatan yang terpadu berdasarkan kaidah-kaidah demokrasi, pengelolaan dan partisipasi organisasi secara terbuka.
- e. Meminimalkan biaya modal dengan memberikan sinyal positif untuk para penyedia modal. Meningkatkan nilai perusahaan yang dihasilkan dari biaya modal yang paling rendah.
- f. Meningkatkan kinerja keuangan dan persepsi yang lebih baik dari para stakeholder atas kinerja perusahaan di masa depan.

#### **E. Tahap-Tahap Penerapan *Islamic Corporate Governance***

Pelaksanaan penerapan *Islamic Corporate Governance* sangat penting bagi perusahaan untuk melakukan pentahapan yang cermat berdasarkan analisis situasi dan kondisi perusahaan, dan tingkat kesiapannya, sehingga penerapan ICG dapat berjalan lancar dan mendapat dukungan dari seluruh unsur di dalam perusahaan. Pada umumnya perusahaan-perusahaan yang telah berhasil dalam menerapkan *Islamic Corporate Governance* menggunakan pentahapan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan
  - a. *ICG Assesment*

Merupakan salah satu upaya untuk mengukur atau lebih tepatnya memetakan kondisi perusahaan dalam penerapan *Islamic Corporate Governance* saat ini. Langkah ini perlu guna memastikan titik awal level terhadap penerapan ICG

dan untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat guna mempersiapkan infrastruktur dan struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan *Islamic Corporate Governance* yang efektif. Dengan kata lain, *Islamic Corporate Governance Assessment* sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu mendapatkan perhatian terlebih dahulu dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mewujudkannya.

b. *ICG Manual Building*

Berdasarkan hasil pemetaan tingkat kesiapan perusahaan dan upaya identifikasi prioritas terhadap penerapannya, penyusunan manual atau pedoman bagi implementasi *Islamic Corporate Governance* dapat disusun.<sup>15</sup> Penyusunan manual dapat dilakukan menggunakan bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. Manual ini dapat dibedakan antara manual untuk organ perusahaan dan manual untuk keseluruhan anggota perusahaan, mencakup beberapa aspek sebagai berikut: 1) Kebijakan ICG perusahaan, 2) Pedoman ICG bagi organ-organ perusahaan, 3) Pedoman perilaku, 4) Audit committee charter, 5) Kebijakan disclosure dan transparansi, 6) Kebijakan dan kerangka manajemen perusahaan, 7) Roadmap implementasi.

---

<sup>15</sup> Gustani, 211.

## 2. Tahap Implementasi

Setelah perusahaan memiliki ICG manual, langkah selanjutnya adalah memulai implementasi di perusahaan. Tahap ini terdiri atas tiga langkah utama yaitu:<sup>16</sup>

- 1) Sosialisasi, sangat diperlukan untuk memperkenalkan kepada seluruh perusahaan berbagai aspek yang terkait dengan implementasi *Islamic Corporate Governance*. Upaya sosialisasi perlu dilakukan dengan suatu tim khusus yang dibentuk langsung berada dibawah pengawasan direktur utama atau direktur yang ditunjuk sebagai ICG Champion di perusahaan.
- 2) Implementasi, yaitu kegiatan yang dilakukan sejalan dengan pedoman ICG yang ada, berdasarkan roadmap yang telah disusun. Implementasi harus bersifat *top down approach* yang melibatkan dewan komisaris dan direksi perusahaan. Implementasi hendaknya mencakup pula upaya manajemen perubahan (*change management*) guna mengawal proses perubahan yang ditimbulkan oleh implementasi ICG.
- 3) Internalisasi, tahap atau metode jangka panjang dalam implementasi. Internalisasi mencakup upaya-upaya untuk memperkenalkan ICG di dalam seluruh proses bisnis perusahaan kerja, dan berbagai peraturan perusahaan. Dengan

---

<sup>16</sup> Gustani, 213.

upaya ini dapat dipastikan bahwa penerapan ICG bukan sekedar dipermukaan atau sekedar suatu kepatuhan yang bersifat superficial, tetapi benar-benar real dan tercermin dalam seluruh aktifitas perusahaan.

### 3. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi adalah tahap yang perlu dilakukan secara teratur dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektifitas penerapan *Islamic Corporate Governance* telah dilakukan dengan meminta pihak independen melakukan audit implementasi dan scoring atas praktek ICG yang ada.<sup>17</sup> Terdapat banyak perusahaan konsultan yang dapat memberikan jasa audit yang demikian, dan di Indonesia ada beberapa perusahaan yang melakukan scoring. Evaluasi dalam bentuk Assessment, audit dan scoring juga dapat dilakukan secara mandatory misalnya seperti yang diterapkan di lingkungan BUMN. Evaluasi dapat membantu perusahaan memetakan kembali kondisi dan situasi serta capaian perusahaan dalam implementasi ICG sehingga dapat mengupayakan perbaikan-perbaikan berdasarkan rekomendasi yang diberikan.

---

<sup>17</sup> Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility*, 112.

## F. Teori Bank Syariah

### 1. Bank

Bank merupakan lembaga keuangan yang menawarkan jasa keuangan seperti kredit, tabungan pembayaran jasa dan melakukan fungsi-fungsi keuangan lainnya secara profesional. Keberhasilan bank ditentukan oleh kemampuan mengidentifikasi permintaan masyarakat akan jasa-jasa keuangan kemudian memberikan pelayanan secara efisien dan menjualnya dengan harga yang bersaing. Menurut undang-undang No.10 tahun 1998 bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>18</sup>

Syariah menurut terminologi Islam adalah hukum-hukum Allah yang diturunkan kepada Nabinya dan ditujukan kepada umat manusia. Tujuan diciptakannya syariah ialah untuk kemashlahatan umat, baik di dunia maupun akhirat. Dalam praktiknya, syariah selalu disamakan dengan ilmu fiqh. Padahal keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Syariah bersifat fundamental dengan cakupan yang sangat luas, sedangkan fiqh bersifat instrumental dan cakupannya terbatas.

Berdasarkan pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa Bank syariah merupakan Bank yang menjalankan seluruh kegiatan

---

<sup>18</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, 7th ed. (Tangerang: Azkia Publizer, 2009), 234.

berdasarkan syariah. menurut Ismail bank syariah merupakan segala sesuatu yang menyangkut Lembaga dan mitra syariah, baik lembaga, kegiatan usaha, cara maupun proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. adapun produk-produk perbankan syariah antara lain produk penghimpun dana dari masyarakat produk penyaluran dana kepada masyarakat, produk pelayanan jasa.

## 2. Jenis-Jenis Bank

### a. Bank Menurut Kegiatan Usaha

Sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, dapat digolongkan berdasarkan jeinis kegiatan usahanya, seperti bank tabungan, bank pembangunan, dan bank ekspor impor. Setelah Undang-undang tersebut berlaku, jenis bank yang diakui secara resmi hanya terdiri atas dua jenis, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Apabila hingga saat ini masih terdapat bank dengan nama *bank pembangunan* atau *bank tabungan* dan lain-lain, maka istilah tersebut hanyalah sekedar nama dan bukan menunjukkan kelompok bank tertentu.<sup>19</sup> Dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Ayat 2 Pasal 5 bahwa Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan meskipun jenisnya dibatasi hanya bank umum dan BPR, bank umum dapat saja berspesialisasi pada bidang ataupun jenis kegiatan tertentu tanpa harus menjadi

---

<sup>19</sup> Arifin, 90.

suatu kelompok tertentu. Penyerdehanaan jenis bank ini diharapkan dapat memudahkan bank dalam memilih kegiatan-kegiatan perbankan yang paling sesuai dengan karakter masing-masing tanpa harus direpotkan dengan perizinan tambahan.

#### **b. Bank Menurut Badan Usaha**

Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri.<sup>20</sup> Untuk memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat, suatu lembaga keuangan wajib memenuhi persyaratan mengenai:, Susunan organisasi dan permodalan, Permodalan, Kepemilikan, Keahlian di bidang perbankan dan Kelayakan rencana kerja. Badan hukum suatu Bank Umum dapat berupa: Perseroan terbatas, koperasi dan perusahaan Daerah. Sedangkan badan hukum Bank Perkreditan rakyat dapat berupa; perusahaan daerah, koperasi, perseroan terbatas dan bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

#### **c. Jenis Bank Menurut Target Pasar**

Sebagian bank memfokuskan pelayanan dan transaksinya pada jenis-jenis nasabah tertentu. Dengan pemfokusan ini diharapkan bank-

---

<sup>20</sup> Budi Santoso, "Determinan Profitabilitas Bank Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis* 26, no. 1 (2021): 14–29, <https://doi.org/10.35760/eb.2021.v26i1.3289>.

bank tersebut dapat lebih menguasai karakteristik nasabahnya sehingga kegiatan usahanya dapat dilaksanakan dengan lebih efisien antara lain karena : Pelayanan, jasa-jasa, dan iklan yang diberikan oleh bank lebih sesuai dengan karakteristik nasabah, proporsi kredit bermasalah lebih sedikit, manajemen dan karyawan lebih terbiasa dan berpengalaman berinteraksi dengan nasabahnya.

Secara umum, jenis bank atas dasar target pasarnya dapat digolongkan menjadi tiga:<sup>21</sup>

**a. Retail Bank**

Bank jenis ini memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah-nasabah retail. Pengertian retail di sini adalah nasabah-nasabah individual, perusahaan, dan lembaga lain yang skalanya kecil. Meskipun pengertian dari kata '*kecil*' atau '*retail*' (retail) adalah relatif, namun biasanya apabila ditinjau dari jasa kredit yang diberikan, nasabah debitor yang dilayani adalah yang memerlukan fasilitas kredit tidak lebih besar daripada Rp 20 miliar. Angka tersebut bukan merupakan angka yang standar atau baku, tapi setidaknya dapat memberikan gambaran tentang kelompok nasabah yang dilayani oleh bank jenis ini.

---

<sup>21</sup> Sesario Tri Nur Hendra and Deny Dwi Hartomo, "Pengaruh Konsentrasi Dan Pangsa Pasar Terhadap Pengambilan Resiko Bank," *Jurnal Bisnis Dan Manajemen* 17, no. 2 (2018): 35, <https://doi.org/10.20961/jbm.v17i2.17176>.

## **b. Corporate Bank**

Bank jenis ini memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah-nasabah yang berskala besar. Mengingat nasabah yang berskala besar ini biasanya berbentuk korporasi, maka bank kelompok ini disebut *corporate bank* meskipun namanya adalah bank korporat (*corporate bank*) tidak berarti seluruh nasabahnya berbentuk suatu perusahaan.<sup>22</sup> Pelayanan dan transaksi yang diberikan kepada suatu perusahaan sering kali membawa konsekuensi berupa pelayanan yang harus diberikan juga kepada karyawan, direksi dan komisaris dari perusahaan tersebut secara individual. Pelayanan yang diberikan secara perorangan di sini diarahkan untuk menjalin kerja sama yang lebih baik dengan nasabah-nasabah korporasi.

## **c. Retail-Corporate Bank**

Disamping kedua jenis bank di atas, terdapat juga bank yang tidak memfokuskan pada kedua pilihan jenis nasabah di atas. Bank jenis ini memberikan pelayanannya tidak hanya kepada nasabah retail juga kepada nasabah korporasi. Penyebab munculnya bank jenis ini tidaklah seragam. Ada bank yang sejak awal sudah menentukan untuk menjadi bank yang melayani baik nasabah retail maupun korporasi. Bank

---

<sup>22</sup> Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, 89.

jenis ini memandang bahwa potensi baik pasar ritel dan korporasi harus dimanfaatkan untuk mengoptimalkan keuntungan maksimal, meskipun terdapat kemungkinan penurunan efisiensi. Ada juga bank yang semula memfokuskan pada nasabah korporasi, tapi kemudian juga memberikan pelayanan kepada nasabah ritel atau sebaliknya karena berbagai alasan. Hal tersebut bisa terjadi karena manajemen memandang telah terjadi perubahan kondisi pasar atau karena terjadi penggantian manajemen sehingga terjadi perubahan strategi pemasaran.

### **3. Fungsi Bank**

Secara spesifik bank dapat berfungsi sebagai *agent of trust*, *agent of development*, dan *agent of service*.<sup>23</sup>

#### **a. Agent Of Trust**

Sebagai lembaga kepercayaan, bank memiliki fungsi *financial intermediary* yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana (penyimpan dana atau kreditur) dan menyalurkan pada pihak yang membutuhkan dana (peminjam dana atau debitur). Fungsi *financial intermediary* ini akan dapat berjalan lancar apabila ada unsur kepercayaan (*trust*).<sup>24</sup> Dalam hal ini masyarakat akan menyimpan dananya apabila dilandasi unsur

---

<sup>23</sup> Arifin, 123.

<sup>24</sup> Arifin, 124.

kepercayaan dan pihak bank sendiri akan menempatkan dan menyalurkan dananya kepada debitur atau masyarakat apabila dilandasi unsur kepercayaan juga.

**b. *Agent Of Development***

Sektor moneter dan sektor riil tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan perekonomian masyarakat. Kedua sektor tersebut berinteraksi saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Sektor riil tidak akan bekerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Tugas bank sebagai penghimpun dan penyalur dana sangat diperlukan untuk kelancaran kegiatan yang ditujukan untuk pembangunan perekonomian masyarakat, seperti kegiatan produksi, distribusi, investasi dan konsumsi barang dan jasa.

**c. *Agent Of Service***

Bank menawarkan berbagai macam jasa disamping dalam melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa-jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa-jasa yang ditawarkan bank seperti transfer uang, inkaso, *letter of credit*, *automated teller machine*, *money market*, *capital market*, dll.

**BAB III**

**PENERAPAN *ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE* DI PT BANK  
SYARIAH INDONESIA LAMONGAN**

**A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

**1. Profil Bank Syariah Indonesia Lamongan**

Bank Syariah Indonesia berada di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusudo No.15 Kel.Tumenggungan Kec.Lamongan. Hadirnya PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang secara resmi lahir pada 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H. Presiden Joko Widodo secara langsung meresmikan Bank Syariah terbesar di Indonesia tersebut di Istana Negara. BSI merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. melalui Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 04/KDK.03/2021 secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021. Selanjutnya, pada 1 Februari 2021, Presiden Joko Widodo meresmikan kehadiran BSI.<sup>1</sup>

Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah lembaga perbankan di Indonesia yang mengoperasikan layanannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam.<sup>2</sup> BSI terbentuk dari penggabungan beberapa bank syariah utama di Indonesia, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah,

---

<sup>1</sup> “Layanan dan profil Bank Syariah Indonesia Lamongan” <https://ir.bankbsi.co.id/> diakses pada hari Selasa 4 Juni 2024.

<sup>2</sup> “Prinsip pengelolaan Bank Syariah Indonesia” <https://www.bankbsi.co.id> diakses pada hari selasa 4 juni 2024.

dan BRI Syariah. Penggabungan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk menguatkan dan meningkatkan efisiensi sektor perbankan syariah di negara tersebut.

Komposisi pemegang saham BSI adalah: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 50,83%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 24,85%, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 17,25%. Sisanya adalah pemegang saham yang masing-masing di bawah 5%.<sup>3</sup> Penggabungan ini menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah tersebut, sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, BSI didorong untuk dapat bersaing di tingkat global. BSI merupakan ikhtiar atas lahirnya bank syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan BSI juga menjadi cermin wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (*Rahmatan Lil 'Aalamiin*).

Potensi BSI untuk terus berkembang dan menjadi bagian dari kelompok bank syariah terkemuka di tingkat global sangat terbuka. Selain kinerja yang tumbuh positif, dukungan iklim bahwa pemerintah Indonesia memiliki misi lahirnya ekosistem industri halal dan memiliki

---

<sup>3</sup> Ibid

bank syariah nasional yang besar serta kuat, fakta bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia ikut membuka peluang. Dalam konteks inilah kehadiran BSI menjadi sangat penting. Bukan hanya mampu memainkan peran penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal, tetapi juga sebuah ikhtiar mewujudkan harapan Negeri.

Berikut adalah beberapa poin kunci tentang Bank Syariah Indonesia:

- a. Prinsip Syariah: BSI mengadopsi prinsip-prinsip syariah yang melarang penerimaan atau pemberian bunga (riba), yang diharamkan dalam Islam. Sebagai gantinya, bank ini menggunakan konsep bagi hasil, di mana keuntungan dan risiko dibagi antara bank dan nasabah, serta transaksi berbasis aset yang sesuai dengan hukum syariah.<sup>4</sup>
- b. Produk dan Layanan: Bank ini menawarkan berbagai produk dan layanan, termasuk tabungan, pembiayaan, dan investasi, yang semuanya dirancang untuk mematuhi hukum syariah. BSI juga menyediakan layanan perbankan digital untuk memudahkan akses nasabahnya.
- c. Pangsa Pasar: Meskipun BSI menargetkan terutama umat Muslim dan mereka yang tertarik dengan perbankan syariah, bank ini juga melayani pelanggan dari berbagai latar belakang. Bank ini memiliki jaringan yang luas di Indonesia dan berambisi untuk memperluas jangkauannya lebih lanjut.

---

<sup>4</sup> Ibid.

- d. Tujuan Penggabungan: Penggabungan bank-bank syariah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan daya saing, dan memperluas cakupan layanan, sehingga menghasilkan bank syariah yang lebih kuat dan mampu berkompetisi tidak hanya di pasar domestik tetapi juga secara internasional.
- e. Kontribusi Sosial-Ekonomi: Sebagai bank syariah, BSI juga berfokus pada kontribusi sosial dan ekonomi, mendukung kegiatan yang berorientasi pada pengembangan masyarakat dan bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Bank Syariah Indonesia telah menjadi pemain penting dalam industri perbankan syariah di Indonesia, memainkan peran kunci dalam pengembangan dan promosi keuangan syariah di negara tersebut.

## **2. Sejarah Bank Syariah Indonesia**

Sejarah Bank Syariah Indonesia dimulai dengan pembentukan Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991, yang merupakan bank syariah pertama di Indonesia.<sup>5</sup> Kehadiran Bank Muamalat menjadi tonggak penting dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Kemudian, pada tahun 1999, pemerintah Indonesia mendirikan Bank Syariah Indonesia sebagai bagian dari upaya untuk memperluas dan memperkuat sistem perbankan syariah di negara ini. Bank Syariah Indonesia didirikan dengan modal dasar yang cukup besar dan

---

<sup>5</sup> Sejarah Bank Syariah Indonesia'' <https://www.bankbsi.co.id> diakses pada hari Senin 26 Juni 2024.

komitmen kuat untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah. Selama bertahun-tahun, Bank Syariah Indonesia terus tumbuh dan berkembang. Mereka telah meluncurkan berbagai produk dan layanan perbankan syariah yang inovatif, memperluas jaringan cabang, dan berupaya memenuhi kebutuhan finansial masyarakat Indonesia yang semakin sadar akan prinsip-prinsip syariah. Bank Syariah Indonesia juga telah menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga keuangan dan perusahaan untuk mendukung pertumbuhan bisnis mereka.

### **3. Prinsip-Prinsip Bank Syariah Indonesia**

#### **a. Tanpa Riba**

Salah satu prinsip utama yang menjadi ciri khas Bank Syariah Indonesia adalah larangan terhadap riba atau bunga. Bank ini tidak memberikan atau menerima bunga dalam bentuk apapun dalam transaksi mereka. Sebagai gantinya, BSI mengimplementasikan prinsip bagi hasil, di mana mereka berbagi keuntungan dan kerugian dengan nasabahnya. Ini menciptakan hubungan yang lebih adil antara bank dan nasabah, di mana risiko dan keuntungan dibagi secara adil.<sup>6</sup>

#### **b. Transparansi dan Keadilan**

Transparansi dan keadilan adalah nilai-nilai yang sangat dipegang oleh Bank Syariah Indonesia. Mereka berkomitmen untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada nasabah

---

<sup>6</sup> Ibid.

mereka tentang semua aspek transaksi dan investasi. Selain itu, BSI juga memastikan bahwa semua transaksi mereka adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tanpa diskriminasi atau penipuan.<sup>7</sup>

c. Investasi yang Berkelanjutan

Bank Syariah Indonesia juga berfokus pada investasi yang berkelanjutan. Mereka tidak hanya memberikan layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga berusaha untuk mendukung proyek-proyek yang berkelanjutan dan memiliki dampak positif pada masyarakat dan lingkungan. Produk dan Layanan Bank Syariah Indonesia Bank Syariah Indonesia menawarkan beragam produk dan layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. Ini termasuk akun tabungan syariah, deposito syariah, pembiayaan syariah, dan produk-produk investasi yang mengikuti prinsip mudarabah. BSI juga menyediakan layanan perbankan digital yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi perbankan dengan mudah dan nyaman.

Selain itu, BSI juga berkomitmen untuk memberikan edukasi keuangan syariah kepada masyarakat, sehingga mereka dapat lebih memahami prinsip-prinsip syariah dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan keuangan mereka. Dalam era di mana kesadaran akan pentingnya keuangan syariah semakin meningkat, Bank Syariah Indonesia terus berperan sebagai pemain kunci dalam

---

<sup>7</sup> Ibid.

membantu individu dan bisnis di Indonesia untuk mencapai tujuan keuangan mereka dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan prinsip-prinsipnya yang kuat dan layanan yang inovatif, BSI terus menjadi pilihan yang relevan dan berarti dalam peta perbankan syariah di Indonesia.

#### **4. Produk dan Layanan PT Bank Syariah Indonesia Lamongan**

BSI Cabang Lamongan menyediakan beragam produk pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan individu dan bisnis, antara lain:<sup>8</sup>

##### **a. Pembiayaan**

- 1) BSI Griya: Pembiayaan untuk pembelian rumah, renovasi, atau refinancing properti.
- 2) BSI Oto: Pembiayaan untuk pembelian kendaraan baru maupun bekas.
- 3) Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM): Dukungan modal usaha untuk pelaku UMKM di Lamongan.
- 4) Pembiayaan Multiguna: Pembiayaan untuk berbagai keperluan konsumtif seperti pendidikan, kesehatan, dan lainnya.
- 5) Pembiayaan Korporasi: Pembiayaan untuk perusahaan besar yang memerlukan modal kerja atau investasi.

##### **b. Pendanaan**

BSI Cabang Lamongan menawarkan berbagai produk pendanaan yang aman dan sesuai dengan prinsip syariah:

---

<sup>8</sup> Ibid.

- 1) Tabungan BSI: Produk tabungan dengan berbagai pilihan yang fleksibel untuk individu dan bisnis.
- 2) Deposito Syariah: Produk investasi dengan imbal hasil yang kompetitif dan sesuai dengan prinsip syariah.
- 3) Giro Syariah: Rekening giro untuk memfasilitasi kebutuhan transaksi harian bisnis dan individu.

c. Layanan Transaksi

BSI Cabang Lamongan menyediakan layanan transaksi yang mudah dan aman:<sup>9</sup>

- 1) BSI Mobile: Aplikasi mobile banking yang memungkinkan nasabah melakukan berbagai transaksi perbankan melalui ponsel.
- 2) Internet Banking: Layanan perbankan online yang memberikan kemudahan akses transaksi kapan saja dan di mana saja.
- 3) Kartu Debit BSI: Kartu debit yang bisa digunakan untuk transaksi di ATM dan merchant yang tergabung dalam jaringan BSI.
- 4) QRIS: Layanan pembayaran non-tunai menggunakan QR code yang memudahkan transaksi di berbagai merchant.

d. Layanan Haji dan Umrah

---

<sup>9</sup> Ibid.

BSI Cabang juga mendukung kebutuhan nasabah yang ingin menunaikan ibadah haji dan umrah:<sup>10</sup>

- 1) Tabungan Haji: Produk tabungan khusus untuk mempersiapkan biaya haji dengan aman dan sesuai syariah.
- 2) Tabungan Umrah: Tabungan untuk mempersiapkan biaya umrah dengan cara yang mudah dan terencana.
- 3) Pembiayaan Haji: Pembiayaan untuk biaya pelaksanaan ibadah haji dengan skema yang sesuai dengan prinsip syariah.

e. Produk Investasi

BSI Cabang Lamongan menyediakan produk investasi yang aman dan sesuai syariah:

- 1) Reksadana Syariah: Investasi di reksadana yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah.
- 2) Sukuk: Obligasi syariah yang memberikan imbal hasil tetap dan sesuai dengan prinsip syariah.
- 3) Produk Investasi Lainnya: Berbagai pilihan investasi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan investasi nasabah dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah.

f. Layanan Konsultasi dan Edukasi

BSI juga menyediakan layanan konsultasi dan edukasi untuk nasabah:

---

<sup>10</sup> Ibid.

- 1) Konsultasi Keuangan Syariah: Nasabah dapat berkonsultasi mengenai produk dan layanan keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
- 2) Edukasi Keuangan Syariah: Program edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai keuangan syariah dan produk-produk BSI.
- 3) Dengan beragam produk dan layanan tersebut, BSI Cabang Lamongan berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan perbankan nasabah dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah.

## **B. Data Khusus**

### **1. Penerapan *Islamic Corporate Governance* PT Bank Syariah Lamongan**

Keadaan di PT BSI Lamongan para pegawai melayani masyarakat dan para nasabah dengan ramah hal ini terbukti pada kunjungan saya ketika akan melakukan penelitian saya berbincang-bincang kepada beberapa pegawai dimana mereka ramah dalam menyambut semua nasabah yang hadir.<sup>11</sup>

Saya berkunjung di BSI lamongan dan saya disambut baik dengan satpan dan beberapa pegawai ketika melakukan sesi wawancara. kemudian dalam melayani para nasabah pegawai menyapa dengan ramaah dan santun.

Kemudian dalam kegiatan setiap hari para pegawai melakukan kegiatan apel pagi sebagai bentuk kedisiplinan para pegawai bank syariah.

Tujuan diadakan apel pagi adalah untuk menjaga kedisiplinan para pegawai sehingga pelayanan yang diberikan sesuai dengan jam dan

---

<sup>11</sup> Syahrul Mubarak, Observasi 27 Juni 2024.

tidak semewarut. Selain itu para pegawai mengikuti intruksi dari atasan untuk mendampingi para nasabah apabila terdapat kesusahan dan tidak memahami terkait teknologi.

Dalam melaksanakan operasional sehari-hari Bank Syariah Lamongan menggunakan acuan dan regulasi yang sesuai dengan ICG (*Islamic Coorate Governance*) yang meliputi adil, amanah, transparansi, akuntabilitas, sesuai dengan syariat, musyawarah, ketujuh tanggungjawab dan responsibilitas.

Adil yang ditanamkan atau dilaksanakan oleh PT Bank Syariah Lamongan ialah mengutamakan dalam hal transaksi antara kedua belah pihak. Hal ini diwujudkan dan diimplementasikan melalui penerapan akad-akad yang adil dan jelas yang menghindari riba sehingga bisa menimbulkan spekulasi berlebihan.<sup>12</sup>

Konsep adil dalam Bank Syariah Lamongan, dan bank syariah secara umum, berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan keadilan dalam segala transaksi. Ini diwujudkan melalui penerapan akad-akad yang adil dan transparan, seperti mudharabah (bagi hasil) dan musyarakah (kerjasama), yang menghindari riba (bunga) dan spekulasi berlebihan. Keadilan tercermin ketika risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional antara bank dan nasabah, sesuai kesepakatan awal.

Hal ini selaras wawancara dengan Ali Mustofa beliau menyampaikan sebagai berikut:<sup>13</sup>

Adil yang dilaksanakan oleh pihak BSI Lamongan ialah tidak mengandung unsur gharar atau ketidakjelasan dalam arti dari awal sudah ada akad yang jelas transparan mengenai transaksi antara pihak nasabah dan pegawai bank.

---

<sup>12</sup> Roni Susanto, Wawancara, 27 Juni 2024.

<sup>13</sup> Ali Mustofa, Wawancara, 27 Jun 2024.

Amanah ialah kepercayaan dan tanggung jawab yang harus diemban dalam setiap transaksi keuangan. Dalam hal ini Bank Syariah Lamongan mengimplementasikan prinsip amanah dalam transaksi ialah bahwa pihak Bank Syariah Lamongan berkomitmen untuk mengelola dan menggunakan dana nasabah dengan transparansi, integritas dan bertanggung jawab penuh dalam menjaga dan mengawasi dana nasabah.<sup>14</sup>

Pelaksanaan prinsip amanah dalam Bank Syariah Indonesia (BSI) Lamongan menurut pengamatan saya mencakup kepercayaan dan tanggung jawab yang harus diemban dalam setiap transaksi keuangan. Prinsip amanah ini berarti bahwa bank berkomitmen untuk mengelola dana nasabah dengan integritas, transparansi, dan sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam praktiknya, bank bertanggung jawab penuh untuk menjaga aset nasabah, menghindari penyalahgunaan, serta memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan benar dan sesuai dengan perjanjian.

Hasil wawancara dengan Roni Susanto didapatkan hasil bahwa dalam menerapkan prinsip transparansi di PT Bank Syariah Lamongan adalah dengan menjelaskan secara terperinci dan detail mengenai akad yang akan digunakan, mengenai resiko yang kemungkinan terjadi pembagian keuntungan dan hal lain yang berkaitan dengan tabungan para nasabah.<sup>15</sup>

Transparansi dalam Bank Syariah Indonesia (BSI) Lamongan berarti memberikan informasi yang jelas, lengkap, dan akurat kepada nasabah dalam setiap aspek layanan perbankan. Transparansi ini mencakup penjelasan yang detail mengenai akad yang digunakan, risiko yang mungkin terjadi, pembagian keuntungan, serta biaya-biaya yang terkait dengan produk atau

---

<sup>14</sup> Joko Suprianto, Wawancara, 27 Juni 2024.

<sup>15</sup> Roni Susanto, Wawancara, 27 Juni 2024.

jasa perbankan syariah. Dalam hal ini, BSI Lamongan memastikan bahwa setiap nasabah memahami dengan baik hak dan kewajiban mereka sebelum menandatangani perjanjian apa pun.

Hasil wawancara dengan Sholihun didapatkan data bahwa akuntabilitas dalam BSI Lamongan adalah tanggung jawab, transparansi dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.<sup>16</sup>

Konsep akuntabilitas dalam Bank Syariah Indonesia (BSI) Lamongan berfokus pada transparansi, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Bank harus bertanggung jawab kepada semua pemangku kepentingan, termasuk nasabah, regulator, dan masyarakat luas, dengan cara memberikan laporan keuangan yang transparan dan akurat, mematuhi aturan syariah dalam setiap transaksi, serta menjaga integritas dalam operasional.

Hasil wawancara bersama Kurniawan didapatkan informasi bahwa kesesuaian BSI Lamongan dalam menjalankan transaksi yaitu berdasarkan dengan prinsip-prinsip utama pada agama Islam.<sup>17</sup>

Menurut pandangan saya sebagai pegawai, Bank Syariah Indonesia (BSI) Lamongan berlandaskan pada prinsip-prinsip utama dalam perbankan Islam, yaitu menghindari riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Bank BSI Lamongan menerapkan akad-akad syariah seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerja sama usaha), murabahah (jual beli dengan margin), dan ijarah (sewa) dalam setiap produknya.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Joko Suprianto didapatkan informasi bahwa dalam pelaksanaan transaksi antara pegawai dan nasabah dilakukan musyawarah terlebih dahulu. Hal ini dilakukan

---

<sup>16</sup> Sholihun Puja Kusuma, Wawancara, 27 Juni 2024.

<sup>17</sup> Kurniaan Dwi Anggoro, Wawancara, 27 Juni 2024.

untuk mencapai kemufakatan antara dua pihak sehingga dapat meminimalkan konflik antara dua pihak.<sup>18</sup>

Proses musyawarah ini berfungsi untuk meminimalkan konflik dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Misalnya, ketika menentukan kebijakan pembiayaan atau investasi, pihak bank akan berkonsultasi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan berbagai pihak terkait untuk memastikan keputusan tersebut tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga selaras dengan aturan syariah. Musyawarah juga digunakan dalam penanganan masalah nasabah, sehingga solusi yang diberikan dapat diterima dengan baik oleh semua pihak.

Hasil wawancara dengan Roni Susanto didapatkan data bahwa konsep tanggung jawab dan responsibilitas pihak Bank Syariah Lamongan diwujudkan dengan memastikan semua produk, layanan yang transparansi.<sup>19</sup>

Konsep tanggung jawab dan responsibilitas di Bank Syariah Indonesia (BSI) Lamongan mencakup kewajiban untuk mematuhi aturan hukum, prinsip syariah, serta menjaga kepercayaan dari nasabah dan pemangku kepentingan lainnya. Ada beberapa aspek penting dari konsep ini: Tanggung Jawab kepada Syariah: BSI Lamongan bertanggung jawab memastikan semua produk, layanan, dan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari riba, *gharar*, dan *maysir*.

Selain bertanggung jawab terhadap produk dan pelayanan yang baik Bank syariah juga bertanggung jawab pada aspek sosial dimana BSI Lamongan menjalankan peran sosial seperti memberi

---

<sup>18</sup> Joko Suprianto, Wawancara, 27 Juni 2024.

<sup>19</sup> Roni Susanto, Wawancara, 27 Juni 2024.

dan membantu pemberdayaan ekonomi umat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kurniawan.<sup>20</sup>

Tanggung Jawab Sosial: Sebagai bank syariah, BSI Lamongan berkomitmen untuk menjalankan peran sosial, seperti memberikan pembiayaan kepada sektor yang produktif dan membantu pemberdayaan ekonomi umat. Nasabah Bank juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang transparan, menjaga keamanan dana nasabah, dan memberikan solusi keuangan yang adil serta etis.

## **2. Kendala dan Solusi pada Penerapan *Islamic Corporate Governance***

### **Bank Syariah Lamongan**

Hasil wawancara dengan Ali Mustofa, Kurniawan D. A., Sholihun dan Roni Susanto, PT Bank Syariah Lamongan Juga menghadapi beberapa tantangan dalam menerapkan ICG yang mana prinsip ICG berupa adil, amanah, transparansi, akuntabilitas sesuai dengan syariat Islam, musyawarah, tanggung jawab dan responsibilitas. Dari keseluruhan prinsip ICG di atas sudah terealisasikan dengan semaksimal mungkin dimana tidak ada unsur yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat. Namun, ada kendala yang sifatnya diluar dari prinsip ICG yaitu inovasi digital. Hal ini selaras dengan pernyataan Ali Mustofa yang menyatakan sebagai berikut:<sup>21</sup>

Diantara tantangan yang dihadapi oleh BSI Lamongan adalah inovasi digital. Mengadopsi teknologi baru sambil memastikan kepatuhan syariah bisa menjadi proses yang kompleks dan mahal. Selanjutnya adalah literasi keuangan

---

<sup>20</sup> Kurniawan Dwi A, Wawancara, 27 Juni 2024.

<sup>21</sup> Ali Mustofa, Wawancara, 27 Juni 2024.

syariah yang rendah dimana banyak daerah yang pengetahuan mengenai literasi keuangan syariah masih rendah. Sehingga, hal ini menghambat penetrasi pasar dan pertumbuhan bank syariah karena masyarakat tidak sepenuhnya memahami keuntungan dan keunggulan produk syariah. Selanjutnya adalah kepatuhan Syariah dalam operasional harian yang mana menjaga kepatuhan dalam operasional sehari-hari bisa menjadi hal sulit, terutama dalam memastikan bahwa semua transaksi dan kegiatan bisnis berjalan sesuai dengan prinsip syariah tanpa kompromi yang mana untuk saat ini banyak terjadi kasus penyalahgunaan dan penyelewengan dana nasabah demi kepentingan pribadi. Maka, untuk mengantisipasi semua hal yang dikhawatirkan maka selayaknya kita sebagai nasabah jadilah nasabah yang ceras dalam mengawal dan mengawasi dana yang kita punya di bank.

Tantangan selanjutnya yang dihadapi oleh PT Bank Syariah Lamongan adalah kompleksitas produk keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian kurangnya sumber daya SDM yang berkompeten dimana tenaga ahli pada bank Syariah Lamongan masih relatif sedikit belum banyak dan yang memiliki pemahaman masih relatif sedikit, selaras dengan pernyataan yang disampaikan Joko Suprianto.<sup>22</sup>

PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Lamongan menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Pertama, kompleksitas produk syariah yang mana menciptakan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah sering kali lebih kompleks dibandingkan produk konvensional.

---

<sup>22</sup> Joko Suprianto, Wawancara, 27 Juni 2024.

## BAB IV

### ANALISIS PRAKTIK *ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE*

#### PADA PT BANK SYARIAH INDONESIA LAMONGAN

##### A. Analisis Penerapan *Islamic Corporate Governance* pada PT Bank Syariah Lamongan

Penerapan *Islamic Corporate Governance* pada Bank Syariah Lamongan yaitu meliputi pertama tentang prinsip keadilan yang meniadakan deskriminatif terhadap orang lain baik nasabah maupun pekerja dan karyawan bank. Kedua, yaitu bersikap amanah dimana pihak bank mengelola dana nasabah dengan baik dan semestinya. Ketiga yaitu transparansi dimana pihak bank memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada para nasabah. Keempat, akuntabilitas dimana manajemen dan dewan direksi harus mempertanggungjawabkan hasil kerja bank BSI Lamongan. Kelima, Sesuai dengan syariat, keenam yaitu musyawarah dimana ada sikap kekeluargaan antara pihak bank dengan nasabah bank. ketujuh tanggung jawab dan responsibiitas kedelapan distribusi kekayaan yang adil.

##### 1. Adil

Hasil telaah data wawancara di atas konsep keadilan yang di terapkan oleh Bank Syariah Lamongan adalah menginterpretasikan pada akad yang adil dan jelas serta menjauhi dari riba.<sup>1</sup> Adil yang dilaksanakan Bank Syariah Lamongan tidak mengandung unsur gharar atau ketidakjelasan dalam transaksi.

---

<sup>1</sup> Lihat Transkrip Wawancara, W/01/27/06/2024.

Prinsip keadilan dalam bank syariah adalah prinsip yang mendasari seluruh operasional dan layanan yang diberikan oleh institusi keuangan syariah.<sup>2</sup> Keadilan ini memastikan bahwa semua pihak yang terlibat, baik itu nasabah, karyawan, maupun pemangku kepentingan lainnya, diperlakukan secara adil dan tanpa diskriminasi.<sup>3</sup> Keseluruhan, konsep keadilan dalam bank syariah bertujuan untuk menciptakan keseimbangan yang adil antara kebutuhan ekonomi dan moral, serta memastikan bahwa semua transaksi dan hubungan dilakukan dengan integritas dan kejujuran sesuai dengan ajaran Islam.

## 2. Amanah

Berdasarkan data wawancara di atas prinsip amanah yang diterapkan oleh Bank Syariah Lamongan ialah menjaga kepercayaan nasabah dan tanggung jawab dalam mengelola dana dengan integritas dan transparansi.<sup>4</sup>

Konsep amanah dalam bank syariah mengacu pada tanggung jawab yang diemban oleh bank untuk mengelola dana dan kepercayaan yang diberikan oleh nasabah dengan penuh integritas dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>5</sup> Amanah berarti bank syariah harus menjaga kepercayaan nasabah dengan menggunakan dana yang dikelola secara bijaksana,

---

<sup>2</sup> Ahmad Hasan Utamy, Irhamna, Basri, “Qanun Aceh Lembaga Keuangan Syariah Nomor 11 Tahun 2018,” *Qanun Aceh Lembaga Keuangan Syariah* 14, no. 2 (2018): 122–32, <https://doi.org/https://doi.org/10.56997/almabsut.v14i2.440>.

<sup>3</sup> Popon Srisusilawati and Nanik Eprianti, “Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah,” *Law and Justice* 2, no. 1 (2017): 12–23, <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4333>.

<sup>4</sup> Lihat Wawancara, W/01/06/2024.

<sup>5</sup> Riska Amalia, Lince Bulutoding, and Sumarlin, “Integrasi Konsep Amanah Dalam Shariah Enterprise Theory : Tinjauan Literatur Komprehensif,” *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 09, no. 01 (2024): 140–48, <https://doi.org/10.37366/jespb.v9i01.1151>.

transparan, dan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Bank juga harus memastikan bahwa semua transaksi dan investasi dilakukan dengan penuh kehati-hatian, menghindari praktik-praktik yang merugikan nasabah atau bertentangan dengan nilai-nilai Islam.<sup>6</sup> Dengan menerapkan amanah, bank syariah berkomitmen untuk memenuhi kewajiban mereka secara jujur dan bertanggung jawab, menjaga kesejahteraan nasabah dan kepatuhan terhadap hukum syariah.

### 3. Transparansi

Prinsip transaansi yang diterapkan pada Bank Syariah Lamongan ialah dengan menjelaskan secara terperinci dan detil mengenai akad yang akan digunakan dalam transaksi, resiko yang mungkin terjadi dan pembagian keuntungan.<sup>7</sup>

Konsep transparansi dalam bank syariah adalah prinsip yang menuntut bank untuk memberikan informasi yang jelas, akurat, dan lengkap kepada semua pemangku kepentingan, terutama nasabah. Transparansi ini mencakup semua aspek operasional bank, termasuk produk dan layanan yang ditawarkan, syarat dan ketentuan pembiayaan, serta risiko dan keuntungan yang mungkin timbul.<sup>8</sup> Bank syariah harus menjelaskan dengan rinci bagaimana dana nasabah dikelola, termasuk alokasi investasi dan

---

<sup>6</sup> Wahyuddin Abdullah Saddam Husain, "Metafora Amanah Pengelolaan Dana Pihak Ketiga (Dpk) Sebagai Penopang Asset Perbankan Syariah Ditinjau Dari Aspek Trilogi Akuntabilitas," *Iqtisaduna* 1 (2015): 60.

<sup>7</sup> Lihat Lampiran Wawancara, W/01/06/2024.

<sup>8</sup> Nai Haryati, "Pengaruh Standar Akuntansi, Transparansi, Dan Kinerja Bank Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia Dengan Profit Sharing Sebagai Variabel Intervensi: Tinjauan Konseptual," *Industrial Research Workshop and National Seminar* 9 (2018): 613–22.

penggunaan dana tersebut, sehingga nasabah dapat membuat keputusan yang informasi penuh. Selain itu, laporan keuangan dan audit bank juga harus disajikan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik, memastikan bahwa tidak ada informasi yang disembunyikan atau disamarkan. Transparansi ini penting untuk membangun kepercayaan dan memastikan bahwa semua aktivitas bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta meminimalkan potensi penyalahgunaan atau kecurangan.<sup>9</sup>

#### 4. Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas yang diterapkan pada Bank Syariah Lamongan adalah dengan bertanggung jawab kepada semua aspek, termasuk nasabah, regulator, dan masyarakat luas dengan memberikan laporan keuangan yang transparan dan akurat.<sup>10</sup>

Akuntabilitas dalam bank syariah adalah prinsip yang menuntut bank untuk bertanggung jawab atas semua keputusan, tindakan, dan hasil yang dicapai dalam operasionalnya, baik kepada nasabah, pemegang saham, regulator, maupun kepada Allah SWT. Bank syariah harus memastikan bahwa semua kegiatan mereka, termasuk pengelolaan dana, pembiayaan, investasi, dan layanan kepada nasabah, dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memenuhi standar etika yang tinggi.<sup>11</sup> Manajemen dan dewan direksi bank syariah harus siap untuk mempertanggungjawabkan

---

<sup>9</sup> Zulkham Akhmad et al., “Filosofi Prinsip Keuangan Islam Dan Implikasinya Pada Perbankan Syariah.”

<sup>10</sup> Lihat Lampiran Wawancara, W/01/06/2024.

<sup>11</sup> Hasriliandi Halim, Desy Rahmawati Anwar, and Universitas Muhammadiyah Bone, “Akuntabilitas Dan Ekuitas Syariah Terhadap Konsep Biaya Hutang Dalam Bisnis Syariah,” *YUME : Journal of Management* 6, no. 3 (2023): 729–36.

setiap keputusan mereka, memastikan bahwa mereka bekerja untuk kepentingan semua pemangku kepentingan dengan adil dan transparan. Akuntabilitas juga mencakup pelaporan keuangan yang jujur dan sesuai dengan standar syariah, serta kesediaan untuk diaudit oleh pihak ketiga guna memastikan kepatuhan dan kinerja yang baik.<sup>12</sup> Dengan demikian, akuntabilitas membantu menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa bank syariah beroperasi secara bertanggung jawab dan beretika. Selanjutnya dengan musyawarah dimana ada sikap kekeluargaan antara pihak bank dengan nasabah bank kemudian pendistribusian kekayaan yang adil dan sesuai dengan syariat Islam.

#### 5. Sesuai dengan Syariat

Bank Syariah Indonesia (BSI) Lamongan berlandaskan pada prinsip-prinsip utama dalam perbankan Islam, yaitu menghindari riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Bank BSI Lamongan menerapkan akad-akad syariah seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerja sama usaha), murabahah (jual beli dengan margin), dan ijarah (sewa) dalam setiap produknya.

#### 6. Musyawarah

Proses musyawarah ini berfungsi untuk meminimalkan konflik dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip

---

<sup>12</sup> Sri wahyuni and Muhammad Wahyuddin Abdullah, "Akuntabilitas Berbasis Syariah Enterprise Theory Dalam Mewujudkan Ekonomi Sustainable," *BALANCA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 01 (2021): 41–54, <https://doi.org/10.35905/balanca.v3i01.1986>.

keadilan, transparansi, dan tanggung jawab.<sup>13</sup> Misalnya, ketika menentukan kebijakan pembiayaan atau investasi, pihak bank akan berkonsultasi dengan Dewan Pengawas Syariah dan berbagai pihak terkait untuk memastikan keputusan tersebut tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga selaras dengan aturan syariah. Musyawarah juga digunakan dalam penanganan masalah nasabah, sehingga solusi yang diberikan dapat diterima dengan baik oleh semua pihak.

#### 7. Tanggung Jawab dan Responsibilitas

Konsep tanggung jawab dan responsibilitas di Bank Syariah Indonesia (BSI) Lamongan mencakup kewajiban untuk mematuhi aturan hukum, prinsip syariah, serta menjaga kepercayaan dari nasabah dan pemangku kepentingan lainnya. Ada beberapa aspek penting dari konsep ini: Tanggung Jawab kepada Syariah: BSI Lamongan bertanggung jawab memastikan semua produk, layanan, dan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari riba, gharar, dan maysir.

### **B. Kendala dan solusi penerapan Islamic Corporate Governance pada PT Bank Syariah Lamongan**

Dalam penerapan ICG yang dilaksanakan oleh Bank Syariah Lamongan yang meliputi aspek adil, amanah, transparansi, akuntabilitas, sesuai dengan syariat, musyawarah, tanggung jawab dan responsibilitas tidak ada kendala dan sudah dilaksanakan dengan maksimal. Dan berdasarkan hasil wawancara dengan

---

<sup>13</sup> Rinda Asytuti, "Urgensi Modal Sosial Dalam Liberalisasi Perekonomian Bagi Usaha Kecil Menengah Di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam* 12 (2016): 235–45, <https://doi.org/10.28918/jhi.v1i1.555>.

Roni Susanto, Ali Mustofa dan Joko Suprianto didapatkan data bahwa ada beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh PT Bank Syariah Lamongan diantaranya yaitu teknologi finansial dan inovasi digital sehingga, mengadopsi teknologi baru sambil memastikan kepatuhan syariah menjadi proses yang kompleks dan juga membutuhkan biaya yang cukup mahal. Selanjutnya yaitu literasi mengenai keuangan yang masih rendah sehingga hal ini dapat penetrasi pasar dan pertumbuhan pada Bank Syariah Lamongan.

Kemudian rendahnya sumber daya manusia yang berkompeten pada bidang syariah dan juga teknologi hal ini juga dapat menghambat pertumbuhan Bank Syariah Lamongan terahir yaitu pendidikan dan kesadaran nasabah dimana mereka belum bisa membedakan dan kurang memahami produk antara syariah dan konvensional. Untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh PT Bank Syariah Lamongan, bank harus mengadopsi pendekatan holistik yang mencakup investasi bertahap dalam teknologi finansial sambil memastikan kepatuhan syariah melalui kemitraan dengan perusahaan fintech yang ahli di bidang syariah. Peningkatan literasi keuangan dapat dicapai melalui program edukasi yang komprehensif dan kampanye sosial yang menjangkau masyarakat luas.<sup>14</sup> Bank juga perlu fokus pada pengembangan sumber daya manusia dengan menyediakan pelatihan dan sertifikasi dalam teknologi dan syariah, serta memperkuat rekrutmen talenta yang relevan. Terakhir, bank harus meningkatkan pendidikan dan kesadaran nasabah melalui konsultasi dan

---

<sup>14</sup> Adhitya Imanuel Wulannata, "Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 20, no. 1 (2017): 133-44.

konten edukasi digital yang menjelaskan perbedaan antara produk syariah dan konvensional.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Peni Haryanti et al., “Peningkatan Literasi Perbankan Syariah Berbasis Digital Platform Di SMK Perguruan Muallimat Cukir Jombang,” *MARTABE : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, no. 7 (2023): 2562–68.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis di atas penelitian ini menghasilkan dua temuan:

1. Islamic Corporate Governance yang diterapkan oleh Bank Syariah Lamongan yaitu: pertama keadilan yang meniadakan deskriminatif terhadap orang lain baik nasabah maupun pekerja dan karyawan bank. Kedua, yaitu bersikap amanah dimana pihak bank mengelola dana nasabah dengan baik dan semestinya. Ketiga yaitu transparansi dimana pihak bank memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada para nasabah. Keempat, akuntabilitas dimana manajemen dan dewan direksi harus mempertanggungjawabkan hasil kerja bank BSI Lamongan. Kelima, yaitu sesuai dengan syariat. Keenam musyawarah dimana ada sikap kekeluargaan antara pihak bank dengan nasabah bank, ketujuh yaitu tanggung jawab responsibilitas.
2. Tantangan yang dihadapi PT Bank Syariah Lamongan dalam menerapkan sistem ICG secara keseluruhan sudah dimaksimalkan dalam memenuhi kriteria ICG. Namun, di luar sistem ICG ada beberapa tantangan yang terjadi seperti minimnya penggunaan teknologi finansial dan inovasi digital, kemudian literasi mengenai keuangan yang masih rendah, selanjutnya rendahnya sumber daya manusia yang berkompeten pada bidang syariah dan juga teknologi dan pendidikan dan kesadaran nasabah dimana mereka belum bisa membedakan dan kurang memahami produk

antara syariah dan konvensional. Sehingga dalam mengatasi tantangan yang dihadapi oleh PT Bank Syariah Lamongan bank harus mengadopsi pendekatan holistik yang mencakup investasi bertahap dalam teknologi finansial.

#### B. Saran

Saran untuk peneliti selanjutnya adalah agar lebih fokus pada analisis dampak jangka panjang dari adopsi penerapan ICG dan teknologi finansial terhadap kinerja operasional dan kepatuhan syariah. Peneliti sebaiknya menggali lebih dalam tentang bagaimana teknologi tersebut dapat diintegrasikan secara efektif dengan prinsip-prinsip syariah tanpa mengorbankan nilai-nilai fundamentalnya. Selain itu, studi tentang strategi optimal dalam mengurangi biaya implementasi teknologi, serta metode untuk meningkatkan literasi digital di kalangan nasabah bank syariah, akan sangat bermanfaat. Penelitian lebih lanjut tentang kolaborasi antara bank syariah dan perusahaan fintech dalam menciptakan inovasi produk yang memenuhi kebutuhan nasabah juga dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mengembangkan sektor keuangan syariah yang lebih maju dan inklusif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno. *Etika Bisnis Dan Profesi*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Amalia, Riska, Lince Bulutoding, and Sumarlin. “Integrasi Konsep Amanah Dalam Shariah Enterprise Theory : Tinjauan Literatur Komprehensif.” *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 09, no. 01 (2024): 140–48. <https://doi.org/10.37366/jespb.v9i01.1151>.
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. 7th ed. Tangerang: Azkia Publizer, 2009.
- Asytuti, Rinda. “Urgensi Modal Sosial Dalam Liberalisasi Perekonomian Bagi Usaha Kecil Menengah Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Islam* 12 (2016): 235–45. <https://doi.org/10.28918/jhi.v1i1.555>.
- Atep, Adya Brata. *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*. Jakarta: Elex Media Komputundo, 2006.
- Endraswati, Hikmah. “Konsep Awal Islamic Corporate Governance: Peluang Penelitian Yang Akan Datang.” *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2015): 89. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i2.89-108>.
- Fadhilah, Hana. “Pengaruh Islamic Corporate Governance (ICG) Terhadap Financial Shenanigans.” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan* Vol.13, no. 1 (2019): 14–22.
- Fatin, Aulia, Nur Hasanah, Wiwit Tasya Fitrianna, Zulfan Lidnan, and Tri Setiady. “Pembangunan Perbankan Syariah : Menyelaraskan Prinsip Hukum Islam Dengan Dinamika Keuangan.” *Journal of Social Science Research* 4 (2024): 7096–7110. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10779>.
- Gustani. *Islamic Corporate Governance (I-CG) Dan Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) Teori Dan Praktik*. Bandung: Pena Persada, 2010.
- Halim, Hasriliandi, Desy Rahmawati Anwar, and Universitas Muhammadiyah Bone. “Akuntabilitas Dan Ekuitas Syariah Terhadap Konsep Biaya Hutang Dalam Bisnis Syariah.” *YUME : Journal of Management* 6, no. 3 (2023): 729–

36.

Hariwibowo, Isnawati. “Analisis Pengaruh Islamic Corporate Governance Terhadap Corporate Sosial Responsibility.” *Esensi Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 2015. <https://core.ac.uk/download/pdf/297665602.pdf>.

Hartono, Nono. “Analisis Pengaruh Islamic Corporate Governance (ICG) Dan Intellectual Capital (IC) Terhadap Maqashid Syariah Indeks (MSI) Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.” *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah* 10, no. 2 (2018): 259. <https://doi.org/10.24235/amwal.v10i2.3249>.

Haryanti, Peni, Athi ' Hidayati, Imam Sopingi, Kusnul Ciptanila, Yuni K Riris, Yulia Roman, and Dede Nurhayati. “Peningkatan Literasi Perbankan Syariah Berbasis Digital Platform Di SMK Perguruan Muallimat Cukir Jombang.” *MARTABE: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, no. 7 (2023): 2562–68.

Haryati, Nai. “Pengaruh Standar Akuntansi, Transparansi, Dan Kinerja Bank Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia Dengan Profit Sharing Sebagai Variabel Intervensi: Tinjauan Konseptual.” *Industrial Research Workshop and National Seminar* 9 (2018): 613–22.

Hendra, Sesario Tri Nur, and Deny Dwi Hartomo. “Pengaruh Konsentrasi Dan Pangsa Pasar Terhadap Pengambilan Resiko Bank.” *Jurnal Bisnis Dan Manajemen* 17, no. 2 (2018): 35. <https://doi.org/10.20961/jbm.v17i2.17176>.

Hendrawan, Sanerya. *Spiritual Management*. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2009.

Henry, Prasetyo. *Prinsip Tata Kelola Perusahaan*. Jakarta: Kencana, 2012.

Huberman, A. Michael, and Saldana Jhonny. *Qualitative Data Analysis a Methods Sourcebook*. America: Arizona State University, 2014.

Indriastuti, Maya, and Naila Najihah. “Improving Financial Performance Through Islamic Corporate Social Responsibility and Islamic Corporate Governance.” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga* 5, no. 1 (2020): 818. <https://doi.org/10.31093/jraba.v5i1.206>.

- Khoirul, Hibat. “Analisis Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Pada Lembaga Keuangan Syariah Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Pengembalian Pembiayaan (Studi Kasus BMT As Salam Kras Kediri).” UIN Satu Tulung Agung, 2018. <http://repo.uinsatu.ac.id/id/eprint/9618>.
- Lidyah, Rika. “Islamic Corporate Governance, Islamicityfinancial Performance Index And Fraudat Islamic Bank.” *Jurnal Akuntansi* 22, no. 3 (2018): 437. <https://doi.org/10.24912/ja.v22i3.398>.
- Masruroh, Dewi. “Penerapan Prinsip Islamic Corporate Governance Dalam Perbankan Syariah (Analisis Bank Mandiri Syariah, Bank Negara Indonesia Syariah, Dan Bank Rakyat Indonesia Syariah).” Universitas Jember, 2016.
- Mattehew B. Miles, A Michael Huberman, Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*. London: SAGE, 2014.
- Mayliza, Riri, and Arie Yusnelly. “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Islamic Social Responsibility Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance* 4, no. 2 (2021): 369–79. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(2\).7616](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).7616).
- Mustofa, Bisri. *Al-Ibris*. kodus, Jawa Tengah: Maktabah Menara Kudus, 2016.
- Nabila, Rema Junega. “Analisis Islamic Corporate Governance Dan Islamic Corporate Social Responsibility Terhadap Reputasi Dengan Kinerja Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Bank Syariah Tahun 2010-2019).” Universitas Islam Negeri Syarifhidayatullah Jakarta, 2016.
- Najib, Haifa, and Rini Rini. “Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance Dan Fraud Pada Bank Syariah.” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 4, no. 2 (2019): 131–46. <https://doi.org/10.35836/jakis.v4i2.23>.
- Oktavia, Vivi, Jefri Ulfi, and Jaka wijaya Kusuma. “Pengaruh Good Corporate Governance Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di BEI Periode 2015 - 2018).” *Jurnal Revenue* 01, no. 02 (2020): 143–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.46306/rev.v1i2.16>.

- Rachman, Tahar. "Perbandingan Prinsip Good Corporate Governance Pada Bank Konvensional Dan Bank Syariah Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 3, no. 2 (2018): 10–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.32507/mizan.v3i2.477>.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018.
- Saddan Husain, Wahyuddin Abdullah. "Metafora Amanah Pengelolaan Dana Pihak Ketiga (Dpk) Sebagai Penopang Asset Perbankan Syariah Ditinjau Dari Aspek Trilogi Akuntabilitas." *Iqtisaduna* 1 (2015): 60.
- Safitri, Dinda Dwi. "Analisis Pengaruh Penerapan Islamic Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jambi." UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.
- Santoso, Budi. "Determinan Profitabilitas Bank Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis* 26, no. 1 (2021): 14–29. <https://doi.org/10.35760/eb.2021.v26i1.3289>.
- Sari, Mike Sonita, and Nayang Helmayunita. "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index Tahun 2013-2017)." *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 1, no. 2 (2019): 751–68. <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/jea.v1i2.108>.
- Siti, Juariah, Dinnul Alfian Akbar, and Hartini Titin. "Peran Kinerja Keuangan Dalam Memediasi Islamic Corporate Governance Terhadap Fraud." *Review of Islamic Economics* 96, no. 1 (2021): 5–29.
- Sonia, Ayesha Riska. "Analisis Implementasi Islamic Corporate Governance Pada Pt. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Banda Aceh." Universitas Islam Negeri ar-Raniry Banda Aceh, 2020.
- Sri wahyuni, and Muhammad Wahyuddin Abdullah. "Akuntabilitas Berbasis Syariah Enterprise Theory Dalam Mewujudkan Ekonomi Sustainable." *BALANCA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 01 (2021): 41–54.

<https://doi.org/10.35905/balanca.v3i01.1986>.

Srisusilawati, Popon, and Nanik Eprianti. "Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah." *Law and Justice* 2, no. 1 (2017): 12–23. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4333>.

Sugiyono. *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta, 2016.

———. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Sutedi, Adrian. *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Syafii, Indra, and Isnaini Harahap. "Peluang Perbankan Syariah Di Indonesia." *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)*, no. 7 (2020): 666–69. <https://prosiding.seminar-id.com/index.php/sainteks>.

Tunggal, A. Wijaya. *Internal Audit Dan Good Corporate Governance*. Jakarta: Erlangga, 2013.

Tuti Anggraini, Ika Adeyani,. "Analisis Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Pensiun Pada Bank Syariah Indonesia KCP Stabat." *Journal Economy and Currency Study (JECS)* 3, no. 2 (2021): 47–66. <https://doi.org/10.51178/jecs.v3i2.298>.

Ummah, Muwahid. "Analisis Praktik Islamic Corporate Governance Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Pt Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Makassar)." Universitas hasanuddin Makasar, 2013.

Utamy, Irhamna, Basri, Ahmad Hasan. "Qanun Aceh Lembaga Keuangan Syariah Nomor 11 Tahun 2018." *Qanun Aceh Lembaga Keuangan Syariah* 14, no. 2 (2018): 122–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.56997/almabsut.v14i2.440>.

Wardayati, Siti Maria. "Implikasi Syariah Governance Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Bank Syariah." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*

19, no. 1 (2011): 1. <https://doi.org/10.21580/ws.2011.19.1.210>.

Wulannata, Adhitya Imanuel. “Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 20, no. 1 (2017): 133–44.

Yusuf, Muhammad Yasir. *Islamic Corporate Social Responsibility*. Depok: Kencana, 2017.

Zulhikam Akhmad, Parmitasari Rika Dwi Ayu, Muhammad Wahyuddin Abdullah, and Isnin Rofiah. “Filosofi Prinsip Keuangan Islam Dan Implikasinya Pada Perbankan Syariah.” *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 1192 (2024): 273–83. <https://doi.org/10.572349/neraca.v2i1.579>.